PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI PTKIN

Hasyim Muhammad
Naili Ni'matul Illiyyun

PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI PTKIN

Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag.
Naili Ni'matul Illiyyun, M.A.

Rafi Sarana Perkasa

PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI PTKIN

HASYIM MUHAMMAD

vii + 140 + halaman, 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-7969-79-7

Diterbikan oleh:

Rafi Sarana Perkasa
Villa Ngaliyan Permai Blok E.9 Semarang 50185
ANGGOTA IKATAN PENERBIT INDONESIA (IKAPI)
Tahun 2022

Telp. +6224 7611825 HP. 081326101101
e-mail: rsp_rafi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

PUJI syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridha, dan karuniaNya buku yang ada di tangan pembaca ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya untuk selalu menebar kebaikan dan kemanfaatan.

Kajian terkait moderasi beragama menjadi tren pada beberapa tahun terakhir. Sejak Kementerian Agama menggaungkan moderasi beragama pada akhir tahun 2019, kajian ini menjadi marak di kalangan peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Meski demikian, konsepsi moderasi telah terinternalisasi dalam berbagai agama termasuk agama Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi. Para mufassir dan pakar mengembangkan konsepsi moderasi dalam konteks dewasa ini. Nilai-nilai moderasi sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya prinsip keadilan,

prinsip egaliter, prinsip kemanusiaan yang selaras dengan semangat Pancasila sebagai ideologi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, implementasi moderasi beragama tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan hambatan nyata di depan mata seperti radikalisme dan ekstremisme yang kian berkembang di Indonesia khususnya di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mengisi ruang tersebut sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama berupaya dalam mengarusutamakan moderasi beragama di kalangan civitas akademika. Buku ini memberikan gambaran sementara terkait apa yang dilakukan PTKIN dalam rangka pengarusutamaan moderasi beragama. Penulis fokus pada dua PTKIN yang ada di Jawa Tengah yaitu UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta dengan melihat basis argumentasi kedua kampus tersebut serta implementasi pengarusutamaan moderasi beragama selama beberapa tahun terakhir.

Buku ini adalah hasil kerja keras tim yang solid mulai dari perencanaan, *preliminary research*, diskusi-diskusi, penelitian di lapangan, hingga penyusunan buku. Selain itu, buku ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoretik maupun praktek dalam implementasi moderasi beragama di PTKIN. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen,

mahasiswa, pakar, maupun peneliti yang konsen pada kajian moderasi beragama di Indonesia.

Kelancaran penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu antara lain Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan buku ini. Kedua, Dr. Imam Makruf, M.Pd., selaku Wakil Rektor I UIN Raden Mas Said Surakarta beserta civitas akademika yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan buku ini, namun penulis tetap berharap buku ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya masukan berupa kritik atau saran yang berguna. Terima kasih.

Semarang, Januari 2022

Penulis

Daftar Isi

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir perkembangan radikalisme beragama di Indonesia menjadi problem yang sangat serius, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Citra perguruan tinggi agama sebagai lembaga yang seharusnya mencetak intelektual yang moderat kembali diragukan. Keraguan ini bermula dari adanya beberapa kasus radikalisme di lingkungan perguruan tinggi agama. Penggunaan cadar, kajian-kajian pro khilafah di masjid-masjid kampus, hingga aksi penolakan diskusi oleh kelompok yang berbeda kerap terjadi di lingkungan kampus. Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat 39% mahasiswa terpapar paham radikal di 15 Provinsi di

Indonesia. Hal ini dikuatkan survei Alvara Research Center tahun 2017 yang menyatakan adanya kecenderungan sikap intoleran di kalangan mahasiswa. LIPI menyebutkan bahwa radikalisasi di kampus dilakukan melalui organisasi kampus dalam rangka rekrutmen kader (Setara 2019). Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghadapi problem radikalisme beragama yang sangat serius. Sementara, perguruan tinggi yang bertanggungjawab pada pendidikan anak bangsa justru menjadi tempat bersemainya paham radikal.

Dalam rangka merespon isu radikalisme beragama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya mengkampanyekan moderasi beragama dalam beragam kegiatan yang dilakukan. Komitmen Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 (Ropi 2019). Tahun 2019 ditetapkan sebagai Tahun Moderasi Beragama oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) (Qolbi 2019). LHS menjadi promotor aktif dalam pengarusutamaan moderasi beragama melalui kurikulum pendidikan, bimbingan manasik haji, dan juga kepenyuluhan (Kemenag 2019). Lebih dari itu, pembuatan film dokumenter dan literasi media juga dilakukan untuk penguatan pendakwah yang moderat (Qolbi 2019). Secara khusus, Kementerian Agama

mengamanatkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk berperan aktif dan melakukan langkah-langkah strategis dalam penguatan moderasi beragama (Kemenag 2021). Perguruan tinggi diharapkan memiliki peran strategis dalam menangkal paham radikal di Indonesia.

Sejauh ini studi tentang perkembangan radikalisme beragama di perguruan tinggi cenderung mengungkap fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa dan mengabaikan peran strategis perguruan tinggi dalam melakukan deradikalisasi. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dalam empat tipe penelitian. Pertama, studi tentang tingkat keterlibatan mahasiswa dalam paham radikal tertentu (Sirry 2020). Kedua, studi yang mengevaluasi minat mahasiswa dalam belajar pancasila dan kewarganegaraan (Winata et al. 2020). Ketiga, studi yang mengungkap peran mahasiswa dalam menyemai paham radikal (Arifianto 2018). Keempat, studi tentang kecenderungan mahasiswa dalam mengkonsumsi dan memproduksi konten radikal di media sosial (Sugihartati, Suyanto, dan Sirry 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wildani Hefni (2020) menunjukkan bahwa PTKIN memiliki kebutuhan yang mendesak dalam mempromosikan moderasi beragama di ruang digital.

Keempat kecenderungan studi tentang radikalisme di perguruan tinggi tersebut lebih banyak melihat

perguruan tinggi sebagai salah satu tempat bersemainya paham radikal dan mengabaikan perannya dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Kajian ini dimaksudkan untuk melengkapi studi terdahulu tentang radikalisme di perguruan tinggi dengan mengkaji peran perguruan tinggi dalam menangkal paham radikal melalui penguatan moderasi beragama. Kajian ini tidak sekedar mengidentifikasi gagasan dan implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, akan tetapi sampai pada basis argumentasi implementasi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi. Lebih lanjut, kajian ini juga akan mengungkap implikasi dari langkah-langkah sistemik yang dilakukan perguruan tinggi dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Sehingga berdasarkan tujuan tersebut hasil penelitian ini akan mampu mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks penguatan moderasi beragama.

B. Kajian Pustaka

Kajian terkait dengan moderasi Islam dalam berbagai tafsir telah dikaji oleh para peneliti (Zamimah 2018; Khaerulasfar 2020; Qoyyimah dan Mu'iz 2021; S, Giovano, dan Fadlurrahman 2021; Ulinnuha dan Nafisah 2020). Prinsip-prinsip Islam moderat dalam perspektif Quraish Shihab telah diteliti oleh (Zamimah 2018). Asfar mengkaji tentang tafsir Sya'rawi dalam melihat konteks

moderasi khususnya pada aspek aqidah dan iman (Khaerulasfar 2020). Sedangkan tafsir Qur'anuradhimi karya Hasan Mustopa membingkai nilai-nilai moderasi dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 143 dan 256 (Sari et al. 2021). Kajian ayat-ayat moderasi dalam tasir al-Mishbah, tafsir an-Nur, dan tafsir al-Azhar diteliti oleh Ulinnuha dan Nafisah (2020). Konsepsi wasathiyyah menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir juga dikaji oleh Qoyyimah dan Mu'iz (2021).

Selaras dengan penelitian tersebut, Az Zafi fokus pada implementasi nilai-nilai moderat melalui kajian tematik Fazlur Rahman (2020). Sedangkan Yusuf et al (2021) menganalisis *double movement* Fazlur Rahmah dalam ayat-ayat moderasi. Moderasi memiliki kedalaman makna tentang kemanusiaan dan tidak selalu identik dengan agama (Ghozali dan Rizal 2021). Hubungan antara kesetaraan gender dan moderasi Islam dalam analisis komparasi terhadap Nasrani dan Yahudi dikaji oleh Meirison et al (2020). Konsep moderasi dalam Al-Qur'an ditinjau dari perspektif teologi Imamiyah diteliti oleh Amini dan Allahbedashti (2019). Kajian mengenai kontekstualisasi moderasi beragama dalam situs tafsiralquran.id diteliti oleh Miftahuddin et al (2021) dengan melihat konsepsi moderasi beragama dari berbagai sisi.

Selain itu, kajian tentang moderasi beragama juga banyak dikaji dalam konteks media sosial. Beberapa kajian membidik bagaimana pendidikan membentuk nilai moderasi beragama pada generasi Z. Upaya yang dilakukan antara lain dengan penguatan toleransi aktif, literasi keagamaan yang moderat, dan menciptakan konten keagamaan yang mudah dipahami dan diakses oleh generasi muda (Faisal 2020; Kosasih 2019; Wibowo 2019). Wibowo (2019) menyoroti kampanye moderasi beragama melalui Facebook tentang pembuatan konten yang bersifat persuasif dan informatif yang berorientasi pada ideologi. Selaras dengan penelitian Kosasih (2019) yang fokus pada literasi media sosial sebagai upaya sosialisasi moderasi beragama. Novia dan Wasehudin (2020) meneliti tentang penggunaan media sosial di masa pandemi Covid-19 dalam menumbuhkan moderasi beragama. Sikap toleransi, adil, tidak ekstrem, dan bijak merupakan cerminan dari spirit moderasi. Kajian ini merekomendasikan kepada para pendidik, pendakwah maupun *public figure* untuk kampanye moderasi beragama melalui konten-konten moderat di media sosial mereka. Kajian lainnya seperti Akmaliah berpendapat bahwa NU lebih cepat dalam merespon pergeseran otoritas keagamaan dibandingkan dengan Muhammadiyah (Akmaliah 2020).

Beberapa peneliti mengkaji kaitan antara kearifan lokal dan moderasi beragama (Arafah 2020; Mahrus dan Prasojo 2020; Mustafa 2020; Nur 2020; Yahya 2020). Arafah (2020) fokus pada studi pustaka terkait nilai-nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan moderasi beragama. Penelitian tersebut dikuatkan dengan kajian Yahya (2020) yang membidik moderasi beragama di tengah pluralitas kota Manado. Melalui slogan "Torang samua ciptaan Tuhan" ini menjadi semangat dalam menumbuhkan moderasi beragama di antara masyarakat yang berbeda latar belakang agamanya. Hal tersebut merupakan kesadaran dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah setempat dalam upaya mengelola keberagaman di kota Manado melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi. Selaras dengan hal tersebut, Nur (2020) melihat Sintuwu Maroso sebagai kearifan lokal yang mampu menjadi dasar moderasi beragama di Poso. Kearifan lokal tersebut mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan bersama dan terimplementasi dalam bentuk kebijakan strategis pemerintah daerah tersebut. Penelitian Mustafa (2020) fokus pada bagaimana masyarakat lokal Wotu menggunakan kearifan lokal *awa itaba la awai assangoatta* dalam menumbuhkan nilai moderasi beragama. Mahrus dan Prasojo (2020) menambahkan bahwa manuskrip Islam di Sambas mengandung nilai-nilai moderat seperti *tasamuh, tajdid,* dan *tasyir*.

Selain itu, terkait dengan negara, budaya dan moderasi, Ibrahim et al. (2019) mengkaji pentingnya penguatan moderasi Islam di wilayah perbatasan. Syatar et al. (2020) meneliti urgensi moderasi beragama ditengah pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang moderat terkait dengan penyikapan covid-19 khususnya dalam perubahan tradisi peribadatan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus untuk kebaikan bersama. Komunitas etnis muslim Tionghoa di Makassar menerapkan moderasi beragama melalui berbagai cara yaitu membuat buletin bulanan yang berisi kajian moderasi, ceramah melalui radio dan televisi lokal, serta kegiatan bakti sosial (Ramli 2019).

Beberapa peneliti juga fokus pada moderasi dan lembaga pendidikan. Mahyuddin et al meneliti tentang peran strategis dua perguruan tinggi keagamaan di Ambon dalam menumbuhkan toleransi dan moderasi. Adanya pengalaman historis ketegangan antara dua kelompok keagamaan melatarbelakangi IAIN Ambon dan IAKN Ambon menginisiasi program dalam mengelola konflik tersebut. Hasilnya potensi gesekan tersebut mampu diminimalisir dengan mengubahnya menjadi sikap terbuka berbasis pada peningkatan rasa persaudaraan dan kemanusiaan serta penggunaan model pembelajaran agama yang multi-religious dan inter-

religious (Mahyuddin, Pikahulan, dan Fajar 2020). Internalisasi prinsip-prinsip *tasamuh, tawazun, tawasuth,* dan *i'tidal* mampu menjadi pondasi moderasi Islam di Indonesia yakni melalui proses pembiasaan nilai-nilai tersebut di pesantren (Dakir dan Anwar 2020). Ma'had Aly Situbondo menanamkan nilai moderasi melalui beberapa kajian di pesantren. Dengan kajian fikih para santri terbiasa menghadapi perbedaan dan bagaimana menyikapinya, sedangkan kajian ushul fikih dan tasawuf digunakan sebagai analisis terhadap perbedaan tersebut (Aziz 2020). Munir dan Herianto (2020) membidik pengaruh tingkat pemahaman moderasi beragama pada prestasi akademik, kesehatan mental, dan keaktifan berorganisasi. Salamah et al. (2020) menyatakan bahwa ada tiga strategi dalam menumbuhkan nilai moderasi beragama di IAIN Kudus yang diupayakan dalam membentuk pola pikir mahasiswa yang moderat dan toleran yaitu membangun Rumah Moderasi, ilmu Islam terapan sebagai mata kuliah penciri, dan membuat kelas ilmu Islam terapan. Selaras dengan penelitian tersebut, beberapa lembaga pendidikan menginisiasi kegiatan dalam rangka mempromosikan moderasi Islam melalui kurikulum, komitmen dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi (Sulhan, Hasbiyallah, and Haq 2018; Syatar, Amiruddin, dan Rahman 2018) dan edukasi serta penguatan moderasi beragama kepada mahasiswa baru (Sirozi and Yenrizal 2020; Supriyanto, Sunaryo, dan Albar

2020). Ma’arif et al menawarkan perspektif baru dalam mencegah radikalisme melalui lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan Singapura dengan implementasi kosmopolitanisme peradaban Islam dan nilai-nilai universal (Ma’arif, Sebastian, dan Sholihan 2020). Hal serupa dilakukan oleh pengasuh pesantren Edi Mancoro Salatiga dalam mencegah radikalisme melalui rekonstruksi kurikulum pesantren dengan melakukan perjumpaan dengan lintas iman dan lintas budaya serta membiasakan dengan nilai-nilai inklusif (Ma’arif 2014).

C. Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada kajian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas. Peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang memiliki status tertentu pada masyarakat. Artinya seseorang yang memiliki status tertentu dimasyarakat diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya (Amin dan Yani 2017).

Peran menjadi sebuah perilaku yang diharapkan oleh lingkungan untuk dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atas status yang diduduki yang mana dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Pada penelitian ini, kampus memiliki status sebagai lembaga yang konsen pada implementasi moderasi beragama di kalangan civitas akademika sehingga dari peran tersebut diharapkan dapat membentuk karakter mereka, yang

mana kampus memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankankan perannya sebagai lembaga.

Menurut Sarwono, bahasan mengenai teori peran dianalogikan sebuah panggung teater yang dimainkan oleh aktor didalamnya untuk menjalankan perannya sesuai dengan jalan cerita. Posisi aktor pada kajian ini merujuk kepada pimpinan kampus untuk menjalankan perannya. Dalam teater, posisi aktor dalam tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada pada lingkup hubungan dengan aktor lainnya (Amin dan Yani 2017).

Hubungan antara aktor satu dengan yang lainnya disebut interaksi sosial yang mana membagi dua golongan sebagai berikut,

1. Aktor (pelaku) yaitu seseorang yang sedang menjalankan suatu peran.
2. Target (sasaran) yaitu orang lain yang memiliki hubungan dengan aktor atas perilakunya.

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai aktor adalah kampus UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said yang menjadi target adalah civitas akademika kampus tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa teori peran berkaitan erat dengan eksistensi aktor dan target untuk memunculkan peran yang diharapkan. Menurut Biddle

dan Thomas terdapat empat istilah yang kaitannya dengan peran, yaitu: (Amin dan Yani 2017)

1. Harapan

Harapan tentang peran merupakan harapan orang lain tentang perilaku yang sesuai yang dilakukan seseorang yang memiliki sebuah peran tertentu. Dalam hal ini kampus memiliki harapan tentang konsepsi moderasi beragama terhadap civitas akademika atas langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut.

2. Norma

Menurut Secord dan Backman, norma merupakan salah satu bentuk harapan yang bersifat meramalkan perilaku seseorang yang akan terjadi. Pada kajian ini, kampus memiliki norma yang berlaku bagi civitas akademika untuk menanamkan nilai-nilai harapan yang nantinya bisa diimplementasikan.

3. Wujud Perilaku

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata dan bukan sekadar sebuah harapan. Dalam kajian ini penanaman moderasi beragama diwujudkan dalam berbagai kegiatan.

4. Penilaian dan Sanksi

Penilaian didasarkan kepada penilaian positif atau negatif yang diberikan kepada orang lain, sedangkan sanksi merupakan usaha untuk mempertahankan suatu nilai positif, sehingga hal yang dinilai buruk dapat menjadi baik. Dalam hal ini, kampus memiliki hak untuk menilai bagaimana civitas akademika berperilaku, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kampus atau belum. Kemudian apabila terdapat civitas akademika kampus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka menjadi kewajiban kampus untuk memberikan sanksi agar dapat membenahi perilaku yang dianggap buruk menjadi baik.

Selain itu, kajian ini juga akan melihat implementasi nilai-nilai moderat di kalangan civitas akademika. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsepsi moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama. Moderasi beragama memiliki dua prinsip utama yaitu adil dan berimbang. Adil adalah memposisikan sesuatu sesuai tempatnya, sedangkan berimbang diartikan sebagai sikap tengah antara dua kutub ekstrem. Prinsip beragama tesebut diorientasikan sebagai upaya pengabdian kepada Tuhan dan memanusiakan manusia (Balitbang Kemenag 2019b). Selaras dengan konsepsi Kementerian Agama, Quraish Shihab merumuskan tiga prinsip moderasi atau *wasathiyyah* antara lain prinsip keadilan, prinsip

keseimbangan, prinsip toleransi (Fahri dan Zainuri 2019; Zamimah 2018). Prinsip pertama diartikan sebagai sikap yang memberikan persamaan hak dan kewajiban secara proporsional yang tidak selalu memberikan ukuran yang sama dari segi kuantitas. Prinsip kedua adalah kadar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan, sedangkan prinsip ketiga adalah ukuran terhadap penambahan maupun pengurangan yang bersifat pemakluman (Fahri dan Zainuri 2019). Afrizal Nur dalam Syifa (2020) menyebutkan karakteristik moderasi Islam secara komprehensif. Ia sepakat dengan prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya dengan penambahan prinsip lainnya yaitu egaliter, musyawarah, maslahah, mendahulukan prioritas, dinamis dan inovatif.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian peran strategis PTKIN dalam pengarusutamaan moderasi beragama merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif. Penelitian kualitatif (Denzin dan Yvonna S Lincoln 2009) di sini meliputi penafsiran dan pendekatan alami terhadap suatu subyek kajian dengan mengungkapkan fenomena atau kejadian dan menyajikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi. Penggalian datanya meliputi data-data empiris yang berasal dari

catatan lapangan, wawancara, percakapan, fotografi, dan rekaman. Kedalaman dan kualitas data sangat ditekankan dalam penelitian kualitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian ini dilakukan di dua PTKIN di Jawa Tengah yaitu UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan.

3. Subyek Penelitian

Civitas akademika yang menginisiasi dan terlibat dalam pengarusutamaan moderasi beragama di dua PTKIN tersebut adalah subyek dalam penelitian ini. Civitas akademika dimaksud meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Keterlibatan civitas akademika dalam kajian ini teridentifikasi dalam proses pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui beberapa cara antara lain pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen.

Pertama, pengamatan langsung. Penulis melihat dan mengamati kegiatan-kegiatan yang diinisisasi oleh dua PTKIN tersebut baik dalam kurun waktu tiga bulan misalnya kegiatan rutin Rumah Moderasi Beragama (RMB), perkuliahan Islam dan Moderasi Beragama,

workshop atau kegiatan sejenisnya, serta keterlibatan kampus dalam penguatan moderasi beragama. Dalam pengamatan ini, penulis merekam dan mencatat aktivitas tersebut dalam catatan lapangan (*fieldnote*) (Creswell 2010).

Kedua, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara lebih mendalam yang berkaitan dengan kebutuhan data dan mungkin pertanyaan belum tersusun dalam pedoman wawancara namun berpijak pada rumusan masalah. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan menuliskan beberapa daftar pertanyaan untuk membantu penulis melakukan wawancara. Cara ini memudahkan informan secara bebas mengekspresikan pendapatnya dan mengikuti alur percakapan.

Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan adalah metode snowball atau chain sampling yaitu memilih informan yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya sesuai kriteria yang telah ditentukan (Ritchie dan Jane 2003) yang dimulai dari ketua Rumah Moderasi Beragama (RMB) di masing-masing kampus sebagai informan kunci sehingga diperoleh beberapa informan berikutnya yang mampu memberikan gambaran yang valid dan menyeluruh. Ketua RMB memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh kampus. Kemudian informan yang direkomendasikan memberikan informasi

lanjutan terkait dengan proses kegiatan penguatan moderasi beragama di kampus secara lebih detail yaitu peran pimpinan PTKIN, harapan, norma, dan sanksi dalam penerapan moderasi.

Ketiga, studi dokumen/ literatur merupakan data sekunder yang memberikan informasi terkait dengan subyek penelitian. Langkah terakhir ini membantu penulis dalam memverifikasi ulang informasi yang berasal dari hasil pengamatan dan juga wawancara sehingga didapatkan data yang valid.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh penulis akan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Denzin dan Yvonna S Lincoln 2009; Miles dan Huberman 2014). Tahapan pertama yakni reduksi data di mana penulis akan melakukan identifikasi data-data yang diperoleh di lapangan, melakukan *coding* data, kemudian data yang relevan dengan topik akan dipilih sedangkan data-data yang kurang relevan akan direduksi. Tahapan kedua adalah penyajian data dengan melakukan klasifikasi data berdasarkan *coding* data yang telah diperoleh. Hasil klasifikasi data tersebut kemudian dielaborasi dengan teknik analisis induktif di mana penulis melihat dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Dengan menggunakan pisau analisis yang tepat dan didialogkan dengan kajian-

kajian sebelumnya, selanjutnya penulis menginterpretasikan data tersebut sehingga didapatkan hasil yang sistematis. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan cara melakukan verifikasi data yang tersaji berpijak pada rumusan masalah yang ada.

6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*, berisi Latar Belakang Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas *Teori Peran dan Hegemoni dalam Konteks Moderasi Beragama*. Di bab ini dirinci menjadi beberapa sub-bab yaitu: (a) Teori Peran (b) Teori Hegemoni (c) Konsepsi Moderasi Beragama (d) Tafsir Ayat-ayat Moderasi Beragama.

Bab III ini membahas *PTKIN di Jawa Tengah sebagai Inisiator Moderasi Beragama*, yang memuat tentang: (a) Konteks Kota Semarang dan Surakarta (b) Profil UIN Walisongo Semarang (c) Profil UIN Raden Mas Said Surakarta

Bab IV membahas *Basis Argumen PTKIN dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama*. Pada bab ini kemudian dirinci menjadi beberapa sub-bab: (a) Moderasi Beragama di Kementerian Agama (b) Urgensi Moderasi

Beragama (c) Gagasan Moderasi Beragama (d) Basis Argumentasi Implementasi Moderasi Beragama di UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said Surakarta.

Bab V berisi *Bentuk-bentuk Inisiasi yang dimiliki PTKIN dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama*. Pada bab ini dirinci lagi menjadi tiga sub bab: (a) Inisisasi akademik (b) Inisiasi non-akademik (c) Peran Strategis PTKIN dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama (d) Perbedaan Implementasi Moderasi Beragama (e) Hegemoni Pemerintah dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama.

Bab VI berisi *Kesimpulan dan penutup*

Pada bagian akhir ini mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran.[]

Teori Peran dan Hegemoni dalam Konteks Moderasi Beragama

A. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori yang digunakan pada kajian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas. Peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang memiliki status tertentu pada masyarakat. Artinya seseorang yang memiliki status tertentu dimasyarakat diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya (Amin dan Yani 2017). Menurut Sarwono, bahasan mengenai teori peran dianalogikan sebuah panggung teater yang dimainkan oleh aktor didalamnya untuk menjalankan perannya sesuai dengan jalan cerita. Posisi aktor pada kajian ini merujuk kepada pimpinan kampus untuk menjalankan

perannya. Dalam teater, posisi aktor dalam tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada pada lingkup hubungan dengan aktor lainnya (Amin dan Yani 2017). Dalam konteks sosial, peran diartikan sebagai suatu fungsi dalam struktur sosial yang dimiliki oleh seseorang yang menjalankannya (Suhardono 1994).

Peran menjadi sebuah perilaku yang diharapkan oleh lingkungan untuk dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atas status yang diduduki yang mana dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Pada penelitian ini, kampus memiliki status sebagai lembaga yang konsen pada implementasi moderasi beragama di kalangan civitas akademika sehingga dari peran tersebut diharapkan dapat membentuk karakter mereka, yang mana kampus memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankankan perannya sebagai lembaga.

Hubungan antara aktor satu dengan yang lainnya disebut interaksi sosial yang mana membagi dua golongan sebagai berikut,

1. Aktor (pelaku) yaitu seseorang yang sedang menjalankan suatu peran.
2. Target (sasaran) yaitu orang lain yang memiliki hubungan dengan aktor atas perilakunya.

Dalam konteks kajian ini yang berperan sebagai aktor adalah pimpinan UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta sedangkan yang menjadi target

adalah civitas akademika kedua kampus tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa teori peran berkaitan erat dengan eksistensi aktor dan target untuk memunculkan peran yang diharapkan. Menurut Biddle dan Thomas terdapat empat istilah yang kaitannya dengan peran, yaitu : (Amin dan Yani 2017).

1. Harapan (*expectation*)

Harapan tentang peran merupakan harapan orang lain tentang perilaku yang sesuai yang dilakukan seseorang yang memiliki sebuah peran tertentu. Harapan berlaku secara umum baik harapan dari seseorang maupun sekelompok orang. Dalam hal ini kampus diharapkan memiliki konsepsi moderasi beragama yang jelas dan mampu dipahami oleh civitas akademika sehingga mampu menginisiasi langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk mempromosikan nilai-nilai moderat.

2. Norma

Menurut Secord dan Backman, norma merupakan salah satu bentuk harapan yang bersifat meramalkan perilaku seseorang yang akan terjadi (*anticipatory*). Ada jenis harapan lain yaitu harapan normatif (*role expectation*) artinya kewajiban yang dilekatkan pada suatu peran. Harapan jenis kedua ini dibagi lagi menjadi dua yaiti harapan yang ada namun tidak diucapkan, dan

harapan yang secara terang diungkapkan yang sering kali disebut tuntutan peran di mana harapan ini menjadi norma yang diinternalisasi.

Pada kajian ini, kampus memiliki norma yang diberlakukan bagi civitas akademika untuk menanamkan nilai-nilai harapan yang nantinya diimplementasikan.

3. Wujud Perilaku (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata dan beragam, bukan sekadar sebuah harapan. Keragaman wujud perilaku tidak ada batasannya tergantung dari motivasi yang dibangun dan juga tujuan akhir yang ingin dicapai selama tidak bertentangan dengan nilai yang berlaku. Wujud perilaku dalam konteks ini kampus melalui Rumah Moderasi Beragama (RMB) secara aktif menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kampanye moderasi beragama dengan intensitas yang tinggi, kemudian dilanjutkan oleh agen-agen moderasi antara lain dosen pengampu mata kuliah maupun pimpinan kampus.

4. Penilaian dan Sanksi

Penilaian didasarkan kepada penilaian positif atau negatif yang diberikan kepada orang lain, sedangkan sanksi merupakan usaha untuk mempertahankan suatu nilai positif, sehingga hal yang dinilai buruk dapat

menjadi baik. Ukurannya terletak pada harapan kolektif dalam masayarakat yang disepakati sebagai norma. Kesan positif maupun negatif akan terbentuk ketika masyarakat melihat peran yang dilakukan oleh aktor. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk menilai bagaimana kampus menyuarakan moderasi beragama melalui perilaku civitas akademika, sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan masyarakat atau belum. Kemudian apabila terdapat warga kampus yang tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk memberikan sanksi agar dapat membenahi perilaku yang dianggap buruk menjadi baik. Penilaian dan sanksi ini bisa berasal dari luar diri yang mana peran tersebut ditentukan oleh orang lain, dan juga bisa berasal dari dalam diri sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

Merton dan Kitt berpendapat bahwa orang membutuhkan rujukan dalam hal pemberian penilaian dan sanksi. Rujukan terseebut antara lain:

1. Fungsi normatif, dalam hal ini kelompok referensi/ rujukan menetapkan standar khusus bagi anggotanya dalam menjalankan peran.
2. Fungsi perbandingan, artinya kelompok referensi/ rujukan diposisikan sebagai alat komparasi untuk mengukur apakah perannya sudah benar atau belum.

B. Teori Hegemoni

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut *eugemonia* yang berarti pemimpin. Hegemoni diartikan sebagai kekuasan individu maupun kelompok atas individu atau kelompok lain dengan cara konsensus dan diterima oleh individu atau kelompok yang didominasi, seperti telah dipaparkan dalam Encyclopedia Britanica yang menceritakan prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, seperti yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto 1993). Gramsci juga menjelaskan mengenai basis dari supremasi kelas bahwa supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral (Patria dan Arief 2003).

Antonio Gramsci menjelaskan hegemoni secara mendalam dengan membawa beberapa perubahan-perubahan fundamental dari hegemoni Karl Marx. Sebagai seorang filsuf dan aktifis politik yang mengembangkan teori untuk melihat perjuangan kaum buruh di Italia di bawah rezim fasis Benito Mussolini (Hutagalung 2004). Gramsci menjelaskan hegemoni sebagai suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas di bawahnya dengan cara

kekerasan dan persuasi (Simon 1999). Jika dalam catatanya *The Prince* karya Machiavelli Gramsci menjelaskan menggunakan *Centaur* mitologi Yunani dengan menjelaskan kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Lebih lanjut Gramsci menjelaskan hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon 1999). Ia menerangkan hegemoni tentang kepemimpinan dan pelaksanaanya sebagai sebuah proses untuk menguasai, yang hal itu berbeda dengan Lenin yang mengartikan hegemonik sebagai sebuah strategi politik untuk revolusi dengan mendapatkan dukungan dari mayoritas.

Hegemoni Gramsci bisa dilihat dengan adanya hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain dengan kelas hegemonik yang menciptakan dan mempertahankan aliansi dalam kelompok dengan melalui perjuangan politik dan ideologis. Gramsci juga menjelaskan hegemoni sebagai sebuah proses mendapatkan kekuasaaan yang ketika masa dominan sudah mendapatkan kekuasaan negara maka kekuasaan dalam genggamanya harus tetap dipertahankan dengan gigih dan harus terus menerus diperjuangkan (Simon 1999). Sehingga hegemoni kekuasaan harus terus-menerus diproduksi untuk tetap mempertahankan

hegemoni oleh kelas yang berkuasa degan pembuatan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial yang terus berubah serta merespon aktifitas kekuatan oposisi dengan bantuan dari kaum intelektual (Faruk 2010).

Seperti yang dikatakan oleh Gramsci melalui konsep hegemoni, Gramsci beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement.* Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan keluarga (Heryanto 1997).

Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik (Aziz 2021). Kelompok sosial yang akan atau ingin berkuasa harus mendominasi terlebih dahulu untuk mengalahkan oposisi

sehingga kelompok sosial itu sendiri menjadi hegemoni sebelum kemudian memiliki kekuasaan atas pemerintahan dan kemudian ketika kelompok sosial itu sudah menjadi dominan di dalam kehidupan masyarakat maka kelompok berkuasa harus tetap terus-menerus melakukan langkah-langkah untuk melanggengkan kekuasaanya. Hegemoni merupakan cara suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi (Simon 1999). Hegemoni dikatakan berhasil jika seorang mampu berkuasa atas kelas yang ada di bawah daripada yang berkuasa. Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa kepada kelas yang dikuasai, penguasa tersebut memiliki kekuasaan atas pengetahuan sehingga mampu menginternalisasi ideologi yang lebih dominan mampu memberikan pengetahuanya kepada orang yang dikuasai sehingga terjadilah kekuasaan atas pengetahuan antara kelas penguasa pengetahuan sehingga terjadilah hegemoni di dalamnya.

C. Konsepsi Moderasi Beragama

Konsepsi moderasi bukanlah hal yang baru bagi umat Islam karena semangat moderasi merupakan salah satu ajaran yang bersumber pada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, moderasi disebut sebagai *al-wasatiyyah* meskipun pada perkembangannya ditemukan perbedaan-perbedaan dalam konteks ini. Secara etimologi, kata *al-wasathiyyah*

berasal dari akar kata *al-wasath* yang merupakan masdar dari kata *wasatha*. Kata *al-wasth* berasal dari pola *dharaf* yang memiliki arti di antara. Kata *al-wasathu* memiliki beberapa makna yaitu: kata benda yang berarti ada diantara dua posisi; kedua, kata sifat yang memiliki arti pilihan, utama, dan terbaik; ketiga, kata ini memiliki arti adil; keempat, berarti sesuatu yang ada diantara hal buruk dan hal baik (Zamimah 2018).

Raghib al-Ashfahani memberikan makna kata *wasathiyyah* sebagai titik tengah yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri, dan juga bermakna keadilan, persamaan, dan kemuliaan (Zamimah 2018) Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *wasathiyyah* sebagai usaha menyeimbangkan antara dua sisi yang bertolak belakang (*at-tawazun*), misalnya egoisme berlawanan dengan altruism. *At-tawazun* mengandung arti memberikan secara proporsional sesuai porsinya kepada masing-masing pihak. Secara umum kata *wasath* itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang bermakna sikap antara boros dan kikir. Kata "pemberani", yaitu sikap di antara nekad (*tahawur*) dan penakut (*al-jubn*). Adapun lawan kata moderasi adalah *tatharruf* atau berlebihan, yang dalam bahasa Inggris berarti *extreme*, *excessive*, dan *radical*. Kata *extreme* juga bisa berarti "berbuat

keterlaluan atau mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya" (Balitbang Kemenag 2019a).

Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Indonesia lahirlah kata serapan wasit yang berarti penegah, pemimpin (dalam pertandingan bola misalnya), dan juga berarti pemisah. Seorang yang memiliki sikap adil akan mejaga keseimbangan dan berada diantara dua keadaan. Pertengahan itu dalam bahasa Arab disebut *wasath*. Dalam hadits Nabi disebutkan "sebaik-baik urusan adalah yang ada di pertengahan". Dalam konteks ini kata *wasath* seringkali dilekatkan dengan kebaikan sehingga orang yang melakukan kebaikan disebut *wasath* karena ia berlaku adil dalam memerikan kesaksian dan keputusan (Balitbang Kemenag 2019a).

Dalam Al-Qur'an kata *wasatha* disebutkan sebanayk lima kali antara lain:

1. Dalam surat al-Adiyat (100): yang berarti berpindah ke tengah barisan, maksudnya masuknya pasukan berkuda ke tengah-tengah medan perang untuk menghalau musuh.
2. Dalam surat al-Qalam (68): 28 dan al-Baqarah (2): 238 yang berarti lebih adil dan lebih berakal. Dalam ayat ini menggunakan kata *awsthuhum* dan *wustha*.
3. Dalam surat al-Maidah (5): 89 menggunakan kata *aswath* yang berarti antara boros dan bakhil.

4. Dalam surat al-Baqarah (2): 143 menggunakan kata *ummatan wasathan* yang berarti sifat yang mengarah pada keadilan dan keutamaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi memiliki dua arti yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Maka bisa dikatakan bahwa orang yang moderat berarti bahwa orang yang bersikap biasa-biasa saja, wajar, dan tidak ekstrem. Dalam konteks Indonesia, kata moderasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *moderâtio*, yang bermakna hal yang bersifat sedang, antara tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Kata tersebut juga memiliki makna mengontrol diri dari sikap kekurangan dan kelebihan. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering dikaitkan dalam konteks pengertian *core* (inti), *average* (rata-rata), *non-aligned* (tidak berpihak), atau *standard* (baku). Sehingga moderat diartikat sebagai sikap yang mengedepankan keseimbangan dalam hal moral, watak, dan keyakinan dalam relasi sebagai individu, maupun dengan instansi. Perlu adanya indikator, ukuran, dan batasan bagaimana menentukan sikap atau cara pandang dalam beragama tergolong moderat atau ekstrem. Indikator tersebut bisa merujuk pada seperti teksteks agama, kearifan lokal, kebijakan pemerintah, serta kesepakatan bersama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap

beragama yang berimbang antara penghormatan kepada cara beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) dan keyakinan agama sendiri (eksklusif) (Balitbang Kemenag 2019a).

D. Tafsir Ayat-Ayat Moderasi

Konsepsi moderasi telah banyak ditemukan di dalam Al-Qur’an misalnya konsep Islam moderat dikaitkan dengan konteks Indonesia. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan surat al-Baqarah ayat 142 - 143 yang mendefinisikan *wasathiyyah* yaitu sikap yang membawa kecenderungan bersikap adil atau tidak memihak kanan dan kiri dan sikap yang proporsional dalam memposisikan Tuhan dan hal duniawi. Sikap adil merupakan sikap pertengahan yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi siapa pun dan dimana pun berada. Posisi tersebut memungkinkan seseorang untuk menyaksikan siapa pun dari segala penjuru. Sedangkan sikap proporsional mampu menempatkan pandangan tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, serta mejadikan dunia sebagai ladang menuju akhirat dan tidak berlebihan dalam memandang dunia.

Selain itu, Quraish Shihab memberikan tiga prinsip dasar yang dimiliki Islam moderat yaitu pandangan tentang Tuhan dan dunia dipahami secara proporsional; tidak memihak kanan dan kiri dalam posisi pertengahan mengantarkan manusia bersikap adil; terakhir, dalam

posisi pertengahan seorang muslim dapat dijadikan teladan bagi semua orang yang bisa dilihat dari segala penjuru yang berbeda. Lebih dari itu, konsepsi moderasi Islam menurut Quraish Shihab bisa dilihat dari beberapa indikator berikut: pertama, keadilan yang berarti memberikan hak yang sama serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, keseimbangan yang berarti memberikan sesuatu sesuai kadarnya secara proporsional. Ketiga, toleransi yang mengandung maksud pemakluman dalam menerima sesuatu dalam mewujudkan kemaslahatan bersama dan hidup berdampingan secara damai (Fahri dan Zainuri 2019; Zamimah 2018)

Dalam penafsiran al-Sya'rawi terkait al-Baqarah ayat 142 - 43 menjelaskan bahwa Allah memberikan sebuah kehormatan pada umat muslim dengan sebutan *ummatan wasathan* atau umat yang adil atau moderat. Kehormatan tersebut merupakan nikmat yang luar biasa yang orang yang beriman. al-Sya'rawi memaknai moderasi dengan bersikap tengah-tengah dalam hal keyakinan. Ia menekankan pentingnya moderasi dalam hal akidah karena Islam datang di tengah-tengah konsepsi agama-agama yang berbeda, ada yang memilih atheis atau pun politheis. Selain itu, al-Sya'rawi juga memandang bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel seimbang karena fleksibilitas Islam sebagai agama yang kontekstual dalam setiap masa dan di mana

pun berada khususnya dalam hal *furu'iyyah*. Moderat juga diartikan sebagai sikap tengah antara materialistik dan spiritualistik agar seimbang amalan di dunia dan akhirat dengan menjadikan dunia sebagai media mencapai akhirat yang kekal (Khaerulasfar 2020). Penafsiran ini selaras dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menambahkan bahwa umat yang moderat akan menjadi saksi bahwa rasul terdahulu telah menyampaikan risalah Tuhan. Umat yang moderat tersebut tidak condong pada kaum materialis maupun spiritualis, namun mampu memposisikan diri dengan seimbang (Qoyyimah dan Mu'iz 2021). Konsepsi moderasi dalam Al-Qur'an tidak hanya bagi umat Islam, akan tetapi juga untuk menunjukkan umat Yahudi dan Nasrani selama mereka menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak menyakiti orang lain dan tidak melampaui batas (Ghozali dan Rizal 2021).

Afrizal Nur dalam Syifa (2020) memberikan indikator Islam moderat antara lain: *tasassuth* yaitu mengambil jalan tengah atau tidak ekstrem dalam menjalankan agama; *tawazun* artinya mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta memposisikan dunia sebagai media menggapai akhirat yang kekal; *i'tidal* atau tegak lurus, maksudnya adalah memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional serta mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya; *tasamuh*

atau sering disebut dengan toleran, diartikan sebagai sikap pemakluman atas perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai baik dalam hal ibadah maupul lainnya; *musawah* atau egaliter yakni memperlakukan orang lain dengan sama rata tanpa memandang latar belakangnya; *syura* atau musyawarah diartikan bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah berdasarkan kemaslahatan bersama; *Ishlah* atau prinsip kebaikan dan kemaslahatan menjadi prioritas; *aulawiyah* yaitu mendahulukan hal yang bersifat prioritas dan harus diutamakan daripada yang lain; *tathawwir wa ibtikar* artinya kontekstual melihat keadaan, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan menciptakan hal baru untuk kemaslahatan; terakhir yaitu *tahaddhur* yang bermakna berperadaban dengan prinsip kemanusiaan dan beradab.[]

PTKIN Di Jawa Tengah Sebagai Inisiator Moderasi Beragama

A. Konteks Kota Semarang dan Surakarta

Indeks toleransi kota Semarang menempati posisi ke 87 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD terendah yakni 2,67 dalam menerapkan prinsip inklusivitas. Skor tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yang salah satunya fokus pada aspek kerukunan dan toleransi. Toleransi agama belum tampak dalam visi kota Semarang. Orientasi pemerintah Kota Semarang dalam RPJMD 2016-2021 menekankan pada perdagangan, jasa, kesejahteraan, dan infrastruktur. Hal tersebut tampak dalam visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2016-2021. Meski demikian, dalam visi

RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 terlihat aspek toleran dalam redaksi berikut "Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya". Kata Religius, di sini berarti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan dan mengamalkannya dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan serta sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Azhari dan Halili 2020).

Sedangkan Kota Surakarta menempati posisi ke-3 RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusifitas dengan skor 6,17. Skor tersebut diperoleh berdasarkan beberapa pertimbangan misalnya orientasi pada jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sangat kuat dibuktikan dengan ketersediaan sarana ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah pemeluk agama dan kepercayaan. Persoalan kesejahteraan spiritual sebagian terwakili dari tantangan peningkatan kualitas sarana peribadatan dan kebebasan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta pembinaan kerohanian bagi semua kelompok agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, Jaminan hak KBB menjadi prioritas. Merujuk pada visi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta yakni "Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera", terdapat penjelasan tentang kata Sejahtera. Sejahtera salah satunya mencakup aspek batin yang berarti ketenteraman, keamanan, kenyamanan

secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan (Azhari dan Halili 2020).

Selain itu Kota Surakarta yang menempati posisi ke 89 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berdampak pada skor yang rendah, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Surakarta telah terjadi 7 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: pertama, penolakan mosaik paving blok di Jalan Jenderal Sudirman Solo oleh Dewan Syariah Kota Surakarta pada tanggal 18 Januari 2019 dengan alasan menyerupai gambar salib sehingga meresahkan umat Islam. Kedua, intoleransi yang berupa penolakan rencana pembangunan Pusat Pengembangan Anak (PPA) Daniel IO Gereja Kristen Indonesia (GKI) Coyudan Joyontakan, Surakarta dilakukan oleh warga 21 Februari 2019. Warga setempat beralasan, di wilayah Joyontakan sudah ada 3 Gereja yang masih aktif. Selain itu warga tidak dilibatkan oleh pihak panitia pembangunan terkait masalah pengurusan perijinan (Azhari dan Halili 2020).

Ketiga, perusakan tempat ibadah dilakukan oleh orang tidak dikenal di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Syaloom pada 19 Agustus 2019. Gereja yang beralamat di Jalan Setiabudi kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo, rusak di bagian tembok pagar pembatas. Diduga

perusakan tersebut terkait dengan sengketa lahan yang sedang ditangani oleh Polresta Solo. Keempat, intoleransi dan pelarangan cadar dilakukan oleh Dosen Fakultas Psikologi (FP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Yayah Khisbiyah dengan menerapkan pelarangan cadar pada saat perkuliahan bagi mahasiswi di kelas yang diampu. Hal tersebut diumumkan melalui laman Facebook pada 13 Februari 2020. Dosen tersebut merasa kesulitan mengenali identitas mahasiswi yang bercadar dan baginya cadar bukanlah sebuah kewajiban. Kelima, intoleransi dilakukan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) berupa penolakan Logo HUT RI ke-75 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap menyerupai simbol salib. DSKS juga memprotes pemasangan logo tersebut pada beberapa tempat di Kota Solo. Hal tersebut dingkapkan saat audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Mereka meminta Kemensesneg untuk menarik logo tersebut karena dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keenam, intoleransi dan pembubaran kegiatan dilakukan oleh ratusan orang yang mengaku ormas keagamaan "Laskar Solo" dengan membubarkan acara Midodareni yang diadakan di kediaman almarhum Habib Segaf Al-Jufri di Jalan Cempaka No. 81 Kampung Mertodranan RT 1 RW 1, Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada 8 Agustus 2020. Kelompok ormas tersebut berdalih

bahwa ada penyelenggaraan acara keagamaan yang sesat. Bahkan ada yang mengatakan "Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal, Bunuh". Para pelaku juga memukuli 3 orang anggota keluarga yang mengadakan acara dan melakukan perusakan mobil di lokasi kejadian. Terakhir, intoleransi dilakukan oleh Forum Anti Syiah Surakarta (FASS) pada Jum'at 14 Agustus 2020. FASS melakukan audiensi ke Kapolsek Pasar Kliwon Surakarta dalam rangka penyampaian investigasi dan pernyataan sikap terkait penolakan tentang kesesatan ajaran Syiah dan perayaan hari raya Syiah baik Idul Ghodir maupun perayaan Asyura. FASS juga menympaikan hasil investigasinya mengenai penolakan di Semarang sejak tahun 2014 maupun penolakan di Pasar Kliwon Solo sejak tahun 2018, hingga terjadinya keributan di Mertodranan Pasar Kliwon pada 8 Agustus 2020. FASS juga menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap Syiah.

Kota Surakarta memperoleh predikat amat baik dalam hal inklusi sosial keagamaan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Kota Surakarta dalam membumikan sikap toleran walaupun kota ini seringkali dikenal sebagai basis gerakan radikal. Berbagai elemen masyarakat berlomba dan berupaya menjadi agen toleransi di kota ini baik antar maupun di internal agama, seperti Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara IAIN

Surakarta (PKPPN) menginisiasi Sarasehan Takmir Masjid Solo Raya dengan tema Masjid Merdeka (Moderat dan Berwawasan Kebangsaan) yang dilaksanakan hari Selasa, 3 November 2020. Selain itu, Dian Nafi selaku Dewan Pembina Yayasan Perdamaian Lintas Agama (YPLAG) Surakarta mengungkapkan bahwa sikap toleransi masyarakat Kota Solo sangat tinggi sejak ratusan tahun yang lalu, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menjaganya. Pernyataan tersebut disampaikan Dian Nafi dalam diskusi publik Ngobrol Mewah (Mepet Sawah), dengan tema 'Solo Merawat Toleransi' di kantor Tribunnews.com, Klodran, Colomadu, Karanganyar (Azhari dan Halili 2020).

B. Profil UIN Walisongo

1. Sejarah UIN Walisongo

IAIN Walisongo (sebelum berubah menjadi Universitas) menetapkan visi sebagai *Perguruan Tinggi Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban*. Dalam mewujudkan visi tersebut, institusi menetapkan strategi pencapaian visi dibagi ke dalam 5 fase, di mana setiap fase berjangka 5 tahun. Fase pertama, yaitu tahun 2014-2018, di mana fase Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke Universitas Islam Negeri (UIN). Pada fase pertama, perubahan bentuk Institut menjadi Universitas telah dilakukan melalui Peraturan presiden

Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Oktober 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo diresmikan oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, bersamaan dengan Dies Natalis ke-45 pada tanggal 6 April 2015 (Tim Senat 2019).

Penguatan peran institusi sebagai Universitas diawali dengan penyesuaian visi menjadi "Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038." Kesatuan ilmu pengetahuan atau *unity of sciences* merupakan *university value* agar mampu menjadi identitas kampus. Sedangkan kemanusiaan dan peradaban merupakan tekad universitas untuk memberikan manfaat dari setiap sendi kegiatan sebagai bentuk konstribusi institusi terhadap kemajuan negara.

Pada akhir fase pertama yakni tahun 2018 beberapa tonggak yang telah dicapai adalah penguatan kelembagaan universitas sesuai dengan Ortaker universitas, bertambahnya program studi umum, perolehan akreditasi perguruan tinggi B, *zero founding* dan status WTP, peringkat pertama Zona Integritas di

lingkungan Kementerian Agama, serta peringkat ke-5 PTKIN versi Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama. Sedangkan fase kedua yaitu Persiapan untuk menjadi Universitas Islam Riset pada tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2019, UIN Walisongo memasuki fase ke dua dari tahapan pencapaian visi, yaitu universitas menyiapkan diri untuk menjadi universitas riset. Pada lima tahun terakhir, banyak perubahan eksternal yang mendorong penyesuaian strategi pencapaian visi dari apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah perkembangan teknologi yang berdampak pada masuknya era *disruption*, kebijakan pemerintah dalam menyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, serta kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, UIN Walisongo Semarang menyusun Rencana Strategi Bisnis (Renstra) untuk fase ke dua, yaitu Tahun 2019 – 2023 agar capaian visi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan (Tim Senat 2019).

2. Struktur Organisasi dan Logo UIN Walisongo

Adapun struktur organisasi di UIN Walisongo tergambar pada bagan berikut:

Sumber : https://walisongo.ac.id/?page_id=4381

Logo UIN Walisongo seperti lentera, simbol ini menggambarkan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber kehidupan. Fungsi lentera terlihat pada peran UIN Walisongo dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Logo tersebut terdiri atas beberapa unsur yang masing-masing mengandung arti sebagai berikut (Humas UIN Walisongo 2017):

1. Gunungan seperti wayang yang bentuknya meruncing ke atas. Gunungan diciptakan tahun 1521 Masehi (1443 Saka) oleh Sunan Kalijaga. Gunungan merupakan simbol yang mengandung beberapa arti, pertama, simbol Walisongo menegaskan misi UIN Walisongo dalam mengembangkan dan

mengimplementasikan kearifan lokal; kedua, simbol mustika masjid; ketiga, gambar gunungan terbalik menyerupai jantung manusia, yang berarti bahwa setiap orang harus selalu ingat untuk beribadah kepada Allah; keempat, simbol kesatuan antara unsur ketuhanan, kemanusiaan dan alam semesta. Allah sebagai poros pengetahuan (*Theocentric*) bersinergi dengan manusia sebagai poros pengetahuan (*Anthropocentric*). Tujuan sinergitas tersebut adalah untuk mengangkat kembali martabat manusia sebagai rahmat bagi semesta. Dengan konsep ini, manusia diharapkan memusatkan diri kepada Allah untuk kemaslahatan manusia;

2. Lima sisi gunungan merupakan simbol Pancasila;
3. Empat simpul geometri. Ini terinspirasi dari hiasan dinding Masjid Mantingan Jepara yang didirikan pada masa Kesultanan Demak tahun 1559 Masehi (1481 Saka) Masjid ini di desa Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Pembangunan masjid ini adalah inisiasi putra Syekh Muhayat Syah, Sultan Aceh yang bernama Raden Toyib. la pergi ke Jepara dan menikah dengan

Ratu Kalinyamat putri Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak. Raden Toyib mendapat gelar Sultan Hadlirin dan sekaligus dinobatkan sebagai Adipati Jepara sampai wafat. Geomerti ini sangat khas dan mampu mewakili *Islamic art* nusantara klasik, la memiliki empat ruas yang saling bersinggungan dan padu, empat ruas tersebut mewakili empat aspek utama pengembangan UIN Walisongo: theo-anthroposentris; humanisasi ilmu-ilmu keislaman; spiritualisasi ilmu-ilmu modern; dan revitalisasi lokal wisdom;

4. Lima ruang kuning menggambarkan lima rukun lslam;
5. Bintang sembilan adalah simbol jumlah Walisongo;
6. Titik putih di tengah melambangkan poros Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Kitab atau buku terbuka melambangkan dasar keilmuan. Hal ini menunjukkan bahwa UIN Walisongo memiliki komitmen dalam mewujudkan perguruan tinggi Islam riset yang konsisten meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan

masyarakat. Buku terbuka membentuk tulisan UIN sebagai identitas Universitas Islam Negeri yang menggambarkan semangat menyala untuk mengkaji, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat;

8. Tulisan Walisongo sebagai nama universitas.

3. Profil Rumah Moderasi Beragama di UIN Walisongo

Rumah Moderasi Beragama (RMB) UIN Walisongo didirikan untuk merespon permasalahan terkait kontra ekstremisme dan radikalisme serta menjaga keberagaman di Indonesia. RMB sebagai rumah bersama civitas akademika UIN Walisongo Semarang untuk mengkampanyekan Islam yang damai dan santun sebagaimana Walisongo. Pada 19 Desember 2019 RMB UIN Walisongo diresmikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Imam Yahya diamanahi menjadi direktur dan Luthfi Rahman sebagai sekretaris (Humas UIN Walisongo 2020c).

Adapun program kerja RMB dibagi dalam beberapa klaster. *Pertama,* kampanye Islam moderat dengan membuat konten video pendek melalui media sosial dan diseminasi gagasan melalui seminar dan workshop. *Kedua*, rekonstruksi pemahaman keagamaan antara lain dengan cara melakukan kajian Islam moderat; melakukan

kajian kitab klasik; serta mendorong kajian-kajian Islam klasik. *Ketiga*, deradikalisasi kebangsaan antara lain dengan cara membuat "Sekolah Moderasi" dan desain kurikulum pendidikan dan karakter yang moderat (Humas UIN Walisongo 2020c).

C. Profil UIN Raden Mas Said Surakarta

1. Sejarah UIN Raden Mas Said Surakarta

IAIN Surakarta mempunyai visi *"Menjadi World Class Islamic University di level Asia Tenggara dalam kajian Islam dan sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2034"*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2011. STAIN Surakarta didirikan pada tanggal 30 Juni 1997 pada mulanya berasal dari IAIN Walisongo di Surakarta yang berdiri pada tanggal 12 September 1992. Adanya IAIN Walisongo di Surakarta ini merupakan ide cemerlang H. Munawir Sadzali, MA Menteri Agama pada saat itu yang mana hal tersebut menjadi *pilot project* guna meningkatkan kualitas IAIN. Harapannya agar IAIN Walisongo di Surakarta mampu menjadi IAIN unggulan yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi yang diakui oleh lembaga-lembaga kredibel (Humas UIN Raden Mas Said 2018b).

Para lulusan MANPK (Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus dari seluruh Indonesia) merupakan input mahasiswa IAIN Walisongo di Surakarta, mereka mahasiswa yang unggul dan pilihan yang tidak diragukan kualitasnya. Kurang lebih 5 tahun IAIN Walisongo di Surakarta berjalan, pada 30 Juni 1997 IAIN Walisongo di Surakarta ini diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta melalui kebijakan Menteri Agama Drs. Malik Fadjar, M.Sc. Kebijakan ini juga menetapkan seluruh fakultas daerah seperti Fakultas Ushuludin di Kudus dan Fakultas Syari'ah di Pekalongan yang awalnya direlokasi ke Surakarta menjadi STAIN Kudus dan STAIN Pekalongan. Kebijakan tersebut memberikan berkah tersembunyi karena memperlihatkan peningkatan mutu akademik selama 13 tahun. Pada 3 Januari 2011 STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta dengan tiga fakultas, yakni: Fakultas Tarbiyah dan Bahasa, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, serta Fakultas Ushuludin dan Dakwah. Peralihan ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi civitas akademika dan masyarakat Islam di Surakarta. IAIN Surakarta diresmikan oleh Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si dan sekaligus pelantikan Rektor yang pertama.

Adapun potensi yang dimiliki oleh IAIN Surakarta antara lain sumber daya manusia yang melimpah (karena

berdekatan dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi di sekitarnya), letak geografis (terletak di segitiga emas: Yogyakarta-Semarang/Salatiga-Surabaya dan juga tersedianya Bandar Udara Internasional Adisumarmo), serta potensi sejarah (memiliki sejarah panjang peradaban Jawa). Melalui dokumen data lulusan membuktikan bahwa sejak berdirinya pada 12 September 1992 hingga 2011/2012 IAIN Surakrta telah meluluskan lebih kurang 13.000 mahasiswa serta animo mahasiswa yang memilih IAIN Surakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Kini dengan tersedianya 23 Program Studi S1, 4 Program Studi di S2 dan 1 Program Studi Doktoral S3 di Pasacasarjana) serta persiapan pembukaan program studi baru diharapkan kampus ini lebih berkapasitas dan unggul. UIN Raden Mas Said Surakarta beralih status dari dari IAIN menjadi Universitas melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2021. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta resmi dilantik pada awal bulan Oktober 2021 (Humas UIN Raden Mas Said 2018b).

2. Struktur Organisasi dan Arti Lambang UIN Raden Mas Said Surakarta

Sumber : https://iain-surakarta.ac.id/profil-iain/struktur-organisasi/

Lambang tersebut terdiri beberapa unsur yang memiliki arti berikut (Humas UIN Raden Mas Said 2018a):

a. Bentuk logo yaitu kelopak bunga yang ada di dalam bangunan kubah yang dipangku oleh sebuah kitab yang terbuka;
b. Kitab yang terbuka menggambarkan Kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu dan ajaran Islam sebagai titik pusat sumber segala disiplin ilmu. Selain itu jug melambangkan dasar keilmuan Islam yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mendalaminya;
c. Kubah menunjukkan identitas Islam simbol bahwa IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang memiliki peran sebagai tempat mendalami ke-Islaman dan keilmuan;
d. Bunga menggambarkan simbol keindahan, keharuman dan pertanda kasih sayang di mana IAIN Surakarta merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang secara filosofis menggambarkan kebersamaan dan kasih sayang antar sesama dan menebarkan keharuman bagi umat manusia;
e. Kelopak bunga yang berjumlah delapan menggambarkan delapan paradigma keilmuan Islam yang dimiliki IAIN Surakarta yakni: Aqidah, Akhlak, Tauhid, Ibadah, kecakapan hidup dan laboratorium, Sains, dan teknologi. Paradigma tersebut sebagai landasan pengembangan keilmuan yang disebarkan ke

delapan penjuru mata angin menuju terbentuknya Perguruan Tinggi yang *rahmatan lil'alamin*;

f. Batik dan ornamen keraton Surakarta pada kelopak bunga memiliki arti IAIN Surakarta merupakan Perguruan Tinggi Islam yang mengakar pada tradisi dan kearifan lokal;

g. Warna kuning emas pada Kelopak bunga yang diambil dari logam mulia, menggambarkan kemuliaan, kekekalan, pengabdian, kemewahan, kehormatan, keabadian, dan kesetiaan. Selain itu, warna tersebut mencitrakan keluhuran budi, ketajaman pikiran dan spiritualitas, dan keagungan cita menuju IAIN Surakarta yang unggul dan terkemuka. IAIN Surakarta hendak menjadi unggul dan terkemuka, namun tetap santun dan rendah hati.

3. Profil Rumah Moderasi Beragama UIN Raden Mas Said Surakarta

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, tujuan membentuk Rumah Moderasi Beragama UIN Raden Mas Said Surakarta (RMB) melanjutkan mandat Kementerian Agama dalam menyuarakan moderasi beragama. Selain itu, untuk memberikan pembinaan kepada civitas akademika terkait dengan pendidikan

moderasi beragama serta mencegah radikalisme dan ekstremisme di lingkungan kampus. Dengan melihat latar belakang historis Soloraya dengan masyarakat yang majemuk dan cenderung berpotensi sumbu pendek karena banyaknya aliran radikal. Meski demikian, sejauh ini belum ditemukan adanya tindakan ekstremisme di lingkungan kampus. Jika ada, maka akan ditindak oleh pimpinan kampus.

Tahun 2021 kepengurusan RMB dipindah roda organisasinya kepada dosen muda, namun secara struktural tidak ada dalam ortaker UIN Raden Mas Said Surakarta. Hal tersebut ternyata menjadi kendala karena terkait penganggaran sehingga RMB tidak bisa mengadakan kegiatan secara mandiri. Alternatifnya RMB melaksanakan kegiatan dengan menempel pada unit lain misalnya kepegawaian, akademik atau kemahasiswaan di bawah Wakil Rektor I seperti kegiatan *public lecture*.

Dalam ortaker baru akan ada rencana pelembagaan ma'had sebagai UPT yang konsen pada Al-Qur'an, ibadah, bahasa, teknologi dan moderasi. Selain itu juga terdapat SKL (muatan ibadah, BTQ, dan moderasi). RMB juga bermitra dengan takmir masjid sebagai elemen masyarakat yang akan melanjutkan semangat moderasi Islam kepada masyarakat luas.

RMB pada tahun ini belum memiliki kegiatan apapun karena tidak adanya anggaran. Namun untuk

tahun depan RMB telah merencanakan target capaian baik internal maupun eksternal. Kegiatan internal yang akan diinisiasi oleh RMB dengan target seluruh civitas akademika yakni dosen, mahasiswa, dan karyawan UIN Raden Mas Said Surakarta dengan memberikan penguatan moderasi beragama. Sedangkan kegiatan eksternal dengan target siswa SMA dan masyaraat umum. Saat ini yang dilakukan RMB masih dalam tahap persiapan seperti memberikan edukasi dengan membuat modul dan buku saku seperti yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, *game* moderasi, dan komik moderasi. Alasan utama mengapa targetnya siswa SMA dikarenakan awalnya timbul aliran-aliran yang mengarah pada radikalisme muncul dari level SMA yaitu melalui organisasi kerohanian Islam. Oleh sebab itu pada tahun ini RMB sedang menyiapkan strategi untuk memberikan kampanye kepada siswa SMA yang berpotensi terpapar paham radikal. Selain itu, RMB juga menyiapkan proyek kerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah untuk memberikan penguatan moderasi kepada para penyuluh agama di Jawa Tengah. Selain kerjasama dengan Kementerian Agama Jawa Tengah, RMB juga menggandeng BNPT dan Walikota Gibran.

RMB telah melakukan survei pada mahasiswa baru 2021 dalam kegiatan PBAK dengan menyebar kuesioner

Google form. Menurut keterangan informan, ada 2172 mahasiswa yang telah mengisi survei tersebut. Survei tersebut dimaksudkan untuk mengukur indeks moderasi beragama. Hasilnya 83,61% dengan total dari beberapa indikator seperti penerimaan budaya lokal sebesar 75%, toleransi 87%, anti kekerasan 82% dan juga keIndonesiaan 89%, penerimaan budaya dalam hal ini memiliki penilaian paling kecil seperti penerimaan budaya lokal yang ada di Surakarta dan sekitarnya seperti hadroh dan kenduren, (hasilnya paling rendah yaitu 75%, dengan nilai maksimal 100).

Survei awal yang dilakukan RMB kepada mahasiswa baru memiliki beberapa tujuan yaitu untuk proses *screening* yaitu melihat latar belakang pendidikan mahasiswa apakah dari SMA, MA, SMK, atau pondok pesantren. Kedua, untuk mengukur indeks moderasi; untuk evaluasi awal; dan sebagai arah dalam menentukan kebijakan pada tahun 2022.

RMB mempunyai 3 divisi yaitu: pendidikan, advokasi, kajian penelitian dan publikasi. Indikator moderasi yang digunakan mengacu pada konsepsi Ma'ruf Amin yaitu: Keindonesiaan: penerimaan PBNU (Pancasila, Bhineka, NKRI dan UUD) Anti kekerasan, Toleran. Penerimaan budaya dalam hal ini paling ditekankan karena paling mudah terjadi gesekan antar masyarakat, contoh saja dalam kegiatan di masyarakat

daerah sini sering terjadi gesekan karena ada perbedaan pandangan, seperti masalah hadrah, ngaji, kenduren dan lain sebagainya.

Gejala ekstremisme tidak ditemukan dalam survei awal di UIN Raden Mas Said, namun potensinya ada. Dibuktikan dengan hasil survei yang disebar di kalangan mahasiswa baru pada saat PBAK terlihat di bawah 2%. Hal ini menjadi perhatian khusus RMB dalam mengawal moderasi beragama di kampus. Namun setelah masuk ke BIMA moderasi, mahasiswa FAB dtemukan ada perubahan membaik dilihat dari survei yang dilakukan FAB. BIMA moderasi (Bilik Islam, Moderasi, dan Adab) merupakan kreasi dosen dalam mengawal moderasi di FAB sejak tahun 2020 sebelum RMB dibentuk. Unit ini dikelola oleh dosen yang mengawal mahasiswa dalam kegiatan diskusi keislaman, ibadah, dan media digital, seminar moderasi untuk mahasiswa baru, pembuatan video moderasi, pelatihan *game* dan komik digital, serta pelatihan penulisan artikel.

Adapun media yang digunakan RMB adalah YouTube dan Instagram dalam kampanye moderasi mahasiswa baru dan peserta KKN yang bertemakan moderasi melalui Kerso Darma (Kerja Sosial, Daring Dari Rumah) dengan bekerja sama dengan LP2M. Otoritas RMB di bawah komando Wakil Rektor I dan bersinergi dengan pimpinan yang lain. Pelibatan tokoh masyarakat

dan tokoh lintas agama belum ada dalam kegiatan RMB, namun sudah direncanakan untuk tahun depan.[]

Basis Argumentasi PTKIN Dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

A. Moderasi Beragama di Kementerian Agama

Kementerian Agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada Kementerian Agama dalam mengelola keragaman yang ada, salah satunya adalah melalui penguatan semangat moderasi beragama. Kementerian Agama dahulu bernama Departemen Agama. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945 Jepang memperkenalkan Kantor Urusan Agama (*Shumubu*), sekaligus juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia (*Masyumi*), kemudian memberi kesempatan

kepada umat muslim untuk mempunyai lembaga bagi aspirasi bagi umat Islam. Kementerian Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Pada awal kelahirannya, Kementerian Agama memberikan batasan tentang jaminan kebebasan beragama dengan membuat konsepsi agama (Balitbang Kemenag 2019a).

Pada masa Alamsjah Ratoe Perwiranegara menjabat sebagai Menteri Agama, pemerintah membuat forum komunikasi antarumat beragama yang diberi nama: Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB). Forum ini aktif menginisiasi kegiatan dialog, seminar, diskusi, dalam berbagai tingkat regional sampai internasional. Di beberapa daerah juga dibentuk forum yang serupa seperti Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA Sumatera Utara) dan Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA). Sedangkan di Sumatera Selatan didirikan Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan atau FOKUSS (Sila, 2017: 122). Lembaga pengkajian kerukunan umat beragama juga dibentuk di beberapa kota, yaitu Ambon, Medan, dan Yogyakarta dengan nama Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB). Konsepsi Trilogi Kerukunan yang dicetuskan oleh Alamsjah Ratoe Perwiranegara berupaya mengajak umat beragama agar memahami bahwa umat di Indonesia ini tidak hanya satu,

melainkan beragama dan berlatar belakang yang berbeda-beda.

Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, usaha dalam mempromosikan moderasi beragama dilakukan lebih sistematis dan berkelanjutan, melalui 3 (tiga) strategi, antara lain: a) sosialisasi dan diseminasi ide moderasi beragama; b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam kebijakan yang sifatnya mengikat; dan c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Balitbang Kemenag 2019a). Saat ini kepemimpinan Menteri Agama dipegang oleh Yaqut Cholil Qoumas yang masih gencar dan tidak surut dalam menyuarakan moderasi beragama.

B. Urgensi Moderasi Beragama

Perspektif moderasi dalam beragama dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena konteks multikultural di negara ini merupakan hal yang niscaya dan tidak mungkin diseragamkan. Poin penting dalam moderasi adalah menerima perbedaan meskipun berbeda keyakinan. Ada tiga alasan utama pentingnya moderasi beragama: *Pertama*, salah satu hal penting hadirnya agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia dengan cara membawa misi damai dan *rahmatan lil alamin*. Selain itu, moderasi

beragama mengutamakan prinsip kemanusiaan. Orang yang ekstrem seringkali beragama atas nama Tuhan namun kenyataannya hanya untuk membela kemuliaan-Nya saja dan menyepelekan aspek kemanusiaan. Orang yang moderat semestinya mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menyadari bahwa itu merupakan inti ajaran agama (Balitbang Kemenag 2019b).

Kedua, kompleksitas kehidupan manusia dan agama di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lain. Misalnya latar belakang masyarakat yang berbeda berimbas pada penafsiran teks-teks agama yang beragam yang berujung pada perbedaan cara pandang dan keyakinan yang menghasilkan sikap beragama yang berbeda-beda pula. Tidak jarang konflik atas nama agama terjadi di masyarakat karena perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama supaya peradaban manusia tidak hancur hanya karena konflik berlatar agama.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dibutuhkan dalam rangka penguatan *local wisdom*. Nilai-nilai agama dijunjung tinggi, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat, ada beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual budaya berelasi dengan rukun dan damai.

Moderasi telah lama menjadi bagian dari tradisi agama-agama di dunia. Agama tersebut memiliki kecenderungan ajaran yang memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebih-lebihan, yang diyakini sebagai sikap beragama yang paling ideal. Persamaan nilai moderasi ini yang mendorong pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad el Tayyeb dengan Paus Fransiskus pada awal Februari 2019. Pertemuan agung tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*) yang menegaskan bahwa ekstremisme (*fanatic extremism*) menjadi musuh bersama yang sesungguhnya saat ini, hasrat saling memusnahkan (*destruction*), intoleransi (*intolerance*), perang (*war*), serta kebencian (*hateful attitudes*) yang mengatasnamakan agama.

Kementerian Agama beragama telah menentukan indikator atau ukuran dalam pengamalan moderasi: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan; dan 4) penerimaan kebudayaan lokal. Komitmen kebangsaan merupakan indikator utama untuk mengukur perspektif dan cara beragama seseorang terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara beserta turunannya dan sikap nasionalisme (Balitbang Kemenag 2019a).

Indikator kedua yakni toleransi dengan cara memberikan ruang terhadap hak orang lain untuk dalam berkeyakinan dan beribadah meskipun berbeda dengan keyakinan sendiri. Toleransi berkaitan dengan sikap terbuka, disertai dengan sikap hormat, menerima perbedaan dan berpikir positif. Aspek toleransi tidak hanya masalah keyakinan agama, namun juga berhubungan dengan perbedaan suku, budaya, ras, dan sebagainya. Dalam hal ini toleransi beragama yang ditekankan adalah toleransi intra-agama dan toleransi antar-agama yang berkaitan dengan aspek sosial maupun politik.

Indikator ketiga adalah anti-kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini diartikan sebagai suatu ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan caracara yang berlebihan atas nama agama, baik secara fisik, verbal, dan pikiran. Radikalisme atau kekerasan ini sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya terwujud, termasuk menyakiti pihak yang tidak sepaham. Meskipun radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tersebut, tetapi bisa juga melekat pada semua agama. Radikalisme biasanya muncul karena ketidakadilan dan keterancaman yang dirasakan oleh seseorang atau

sekelompok orang. Ia akan lahir secara ideologis dengan memupuk kebencian terhadap kelompok yang dianggap oposisi dan menyebabkan ketidakadilan yang mengancam identitasnya.

Keempat, indikator moderasi adalah penerimaan terhadap budaya lokal untuk melihat sejauh mana seseorang mampu menerima praktek agama yang mengakomodasi kearifan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat cenderung mudah dalam menerima budaya lokal terkait dengan cara beragamanya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, ada kelompok yang tidak akomodatif terhadap kearifan lokal karena dianggap sebagai suatu hal yang menciderai kemurnian agama.

C. Gagasan Moderasi Beragama

Sosialisasi gagasan moderasi beragama kepada masyarakat perlu dilakukan secara massif agar masyarakat Indonesia memahami pentingnya memiliki cara pandang dan sikap yang moderat. Dalam konteks Kementerian Agama, sosialisasi moderasi beragama dilakukan secara sistematis sejak awal Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama pada masa Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Gagasan "jalan tengah" (*the middle path*) dalam beragama sebenarnya pernah dikemukakan oleh Menteri Agama Tarmizi Taher, melalui bukunya *Aspiring for the Middle Path: Religius*

Harmony in Indonesia (1997). Buku tersebut merupakan kumpulan teks pidatonya selama menjabat sebagai Menteri Agama (1993-1998) yang berisi tema besar, seperti: konsep muslim sebagai *ummatan wasaṭhan*, posisi dan kontribusi muslim Indonesia dalam konteks global, hubungan agama dan Pancasila, serta pandangan Islam tentang kemajuan sains dan teknologi. Gagasan moderasi lslam buku tersebut disinggung sebagai salah satu tema hanya dalam konteks Islam. Pada masa kepemimpinan Suryadharma Ali, gagasan moderasi belum dijadikan sebagai visi Kementerian Agama, dan belum ada upaya nyata dan hanya dikumandangkan dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama (Balitbang Kemenag 2019a).

Di era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku mengambil posisi di tengah-tengah, tidak ekstrem dalam pemahaman dan praktek beragama, dan bertindak adil. Kementerian Agama berupaya agar moderasi menjadi bagian dari perspektif pemerintah dalam menentukan pembangunan nasional. Meski bukan negara agama, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama berupaya menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama agar menjadi inspirasi membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab

berdasarkan falsafah Pancasila, berakhlak mulia, dan berbudaya.

Dalam moderasi beragama menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keseimbangan, kesantunan, dan persaudaraan. Narasi dan ekspresi keagamaan diungkapkan dengan santun. Moderasi beragama dipraktikkan oleh masyarakat sudah sejak dahulu kala dan telah menjadi kearifan lokal dalam mengelola keragaman (Sila, 2017). Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan warisan para leluhur dan terbukti mampu menyelesaikan konflik-konflik sosial keagaman sejak dahulu kala. Moderasi beragama mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dan cara pandang masyarakat di nusantara. Nilai moderat ini ditemukan di semua agama, karena pada dasarnya semua agama menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama tidak hanya tertulis dalam setiap pidatonya melainkan juga meminta kepada struktur jaringannya untuk mengimplementasikan dalam berbagai program. Ia juga secara aktif mengajak dialog dengan tokoh agama, budayawan, akademisi, kaum milenial, dan sebagainya untuk menciptakan kedamaian dan hidup berdampingan secara damai.

Pada November 2018 Kementerian Agama menginisiasi sarasehan dengan mengundang budayawan

dan agamawan di Yogyakarta untuk menengahi kepentingan pengembangan agama dan budaya. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan "Permufakatan Yogyakarta", yang berisi bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, agama dan budaya tidak dipertentangkan. Dalam hal pengembangan budaya harus menghargai nilai-nilai agama, dan sebaliknya juga dalam pengembangan agama di negara ini tidak boleh merusak keragaman tradisi, budaya dan adat istiadat di Indonesia. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, merespon secara khusus (*Kompas*, 6/11/2018), dengan menyerukan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Menjelang akhir 2018, Kementerian Agama mengadakan dialog antariman dan antargenerasi di Jakarta. Kurang lebih 50 budayawan, akademisi, agamawan, generasi milenial, dan media hadir dalam Dialog Ancol tersebut dan kemudian menghasilkan dokumen "Risalah Jakarta tentang Kehidupan Beragama di Indonesia", isinya memperkuat betapa pentingnya moderasi beragama.

Ekstremisme dan eksklusivime beragama menegasikan esensi ajaran agama itu sendiri, serta menghilangkan rasa aman para generasi muda yang berkreasi mengawinkan nilai-nilai agama di ruang-ruang digital. Semangat Risalah Jakarta ini disepakati untuk diterjemahkan ke dalam program-program Kementerian

Agama di tahun 2019, dengan cara menginternalisasi nilai-nilai agama serta menjaga keharmonisan umat beragama. Sehingga tahun 2019 dianggap sebagai momentum dan tahun moderasi beragama. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama bulan Januari 2019 di Jakarta, Lukman Hakim Saifuddin membawakan pidato yang berjudul "Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019". Dalam pidato tersebut, ia mensosialisasikan tiga hal kepada seluruh pimpinan Kementerian Agama dan seluruh jajarannya untuk dipahami, disosialisasikan, diimplementasikan dalam program. Tiga hal tersebut adalah: moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. ia meminta agar moderasi beragama menjadi spirit yang menjiwai program Kementerian Agama Tahun 2019. Ia juga mendeklarasikan 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Hal tersebut sejalan dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang menjadikan 2019 sebagai "*The International Year of Moderation*" (Balitbang Kemenag 2019a). Kementerian Agama melalui visi moderasi beragama ingin mewujudkan kebersamaan dan pelayanan yang unggul kepada umat. Di era digital melakukan integrasi data menjadi hal yang wajib dilakukan oleh Kementerian Agama. Sejak saat itu, sosialisasi moderasi beragama semakin gencar melalui

berbagai kegiatan seperti *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan lainnya.

D. Basis Argumentasi Teologis UIN Walisongo

Dalam penerapan moderasi beragama di UIN Walisongo, RMB memiliki sinergi yang kuat dengan pimpinan. Jadi dalam menjalankan kebijakan moderasi beragama bukan hanya RMB saja yang menjadi pusat keputusan, namun pimpinan kampus juga turut memutuskan program apa saja yang akan dijalankan. RMB cukup kuat dalam hal otoritas yang dimiliki. Hal tersebut terbukti dari beberapa video yang digunakan UIN Walisongo terlihat jelas logo RMB. Selain itu, di media sosial UIN Walisongo yang lain juga aktif menggunakan logo RMB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim penulis, dalam pengarusutamaan moderasi beragama, UIN Walisongo memiliki beberapa basis argumentasi. Argumentasi teologis yang digunakan UIN Walisongo dalam menerapkan moderasi beragama adalah dalil Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 143.

> *"wa każālika ja'alnākum ummataw wasaṭal litakụnụ syuhadā`a 'alan-nāsi wa yakụnar-rasụlu 'alaikum syahīdā, wa mā ja'alnal-qiblatallatī kunta 'alaihā illā lina'lama may yattabi'ur-rasụla mim may yangqalibu 'alā 'aqibaīh, wa ing kānat lakabīratan illā*

ʻalallażīna hadallāh, wa mā kānallāhu liyuḍī'a īmānakum, innallāha bin-nāsi lara`ụfur raḥīm"

Penjelasan dari ayat tersebut adalah etika seseorang ingin mempurifikasi Islam, kembalinya ke Islam yang moderat bukan pada Islam yang radikal dan dalam lafadz *jaalna* dalam ayat tersebut berarti *fi'il madhi* "kita sudah menjadikanmu sebagai *ummatan wasathon*" dan konsep *washaton* itu dikaitkan dengan hadist Nabi yang juga menjadi dasar atau dalil yang digunakan yaitu "sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah". Maka *wasathon* diartikan yang terbaik karena yang tengah yang paling baik. Sedangkan untuk pedoman dari undang-undang yang digunakan yaitu Pancasila yaitu sila 1 sampai dengan 5.

Namun terkait dengan kebijakan yang ditetapkan UIN Walisongo, informan menegaskan jika kebijakan yang ditetapkan masih menginduk dengan apa yang digaungkan oleh Kementerian Agama karena UIN Walisongo belum mampu menemukan indikasi baru selain tentang kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hal ini diorientasikan dalam skala nasional untuk beberapa tahun ke depan UIN Walisongo akan terus mengikutinya walaupun mungkin ada indikasi penambahan baru jika dalam penelitian atau kajian telah ditemukan indikasi baru yang bisa di tetapkan.

E. Basis Argumentasi Kultural UIN Walisongo

Selain basis argumentasi teologis, UIN Walisongo juga memiliki argumentasi kultural. Argumentasi ini menguatkan bahwa praktek moderasi beragama telah dilakukan oleh UIN Walisongo berdasarkan kebiasaan yang telah lama dipraktekkan. Sebelum Kementerian Agama menggaungkan moderasi beragama, UIN Walisongo telah menerapkan semangat moderasi misalnya dalam hal larangan penggunaan cadar, kemudian beberapa aturan-aturan yang di terapkan UIN Walisongo yang menentang anti pancasila dan akomodatif dalam prinsip walisongo yang menerapkan kearifan lokal (*local wisdom*). Terkait dengan larangan penggunaan cadar informan menjelaskan jika hal tersebut merupakan sebuah langkah preventif untuk mengantisipasi dan mencegah radikalisme karena pada umumnya orang yang bercadar pasti memiliki ideologi oleh sebab itu pimpinan berusaha mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, beberapa dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dengan perspektif yang terbuka. Dalam mata kuliah Dialog Antar Agama misalnya, dosen tidak hanya memberikan teori dan presentasi di depan kelas, namun juga mengajak mahasiswa untuk *field trip* ke gereja bertemu dan berdiskusi dengan pemeluk agama lain. Mahasiswa antusias dalam kegiatan yang diinisiasi

oleh dosen tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya dosen dan mahasiswa yang kemudian aktif menjadi pegiat lintas agama di kota Semarang.

Kegiatan lain yang serupa adalah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh salah satu prodi di UIN Walisongo dengan mengunjungi Omah Petruk yang dikelola oleh para Romo dan Frater Katolik di Yogyakarta. Mahasiswa belajar terkait dengan filsafat dan perspektif baru yang diajarkan oleh pemuka agama Katolik. Selain itu, kegiatan-kegiatan dialog lintas iman juga sering kali diselenggarakan oleh program studi tertentu di UIN Walisongo misalnya program studi Studi Agama-Agama. Basis argumentasi kultural tersebut diinisiasi oleh *grass root* yang bersifat *bottom up*, yaitu gagasan tersebut berasal dari dari mahasiswa dan dosen kemudian melibatkan civitas akademika lainnya dalam kegiatan tersebut.

F. Basis Argumentasi Teologis UIN Raden Mas Said Surakarta

Dalam Rencana Induk Pengembangan, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki profil lulusan yang berkarakter *ibadurrahman* yaitu alumni yang memiliki integritas tinggi, mampu bersikap dan berpikir kritis progresif, memiliki semangat perjuangan yang luhur, dan

memiliki kepribadian yang humanis dan moderat (Tim Senat 2020).

Dalam surat Al Furqan ayat 63 disebutkan ayat berikut:

> *"Wa 'ibādur-raḥmānillażīna yamsyụna 'alal-arḍi haunaw wa iżā khāṭabahumul-jāhilụna qālụ salāmā"*

Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa karakter *ibadurrahman* antara lain rendah hati dalam bersikap, selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk sesama. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, karakter ini sangat dibutuhkan dan selaras dengan prinsip moderasi yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kemaslahatan.

G. Basis Argumentasi Kultural UIN Surakarta

UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki pusat kajian bernama Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara (PKPPN) yang diresmikan pada tahun 2017. Pada awalnya Zainal Anwar dan koleganya secara sosial kultural yang memiliki latar belakang pesantren memiliki perhatian khusus terhadap kajian ini. PKPPN secara kelembagaan merupakan lembaga non-ortaker agar lebih luwes dalam berkiprah. Inisiator bekerja berdasarkan spirit untuk memberikan transformasi nilai budaya dalam pesantren agar bisa

menjadi bagian dari civitas akademika, serta agar dapat mengorganisir nilai-nilai individu di lingkungan kampus menjadi lebih baik.

Berdasarkan pernyataan informan, dalam mencari kerjasama atau jaringan PKPPN juga memanfaatkan jaringan dari para anggota yang ada di dalamnya karena sebagian dari mereka ada yang berlatar belakang aktivis NGO, pondok pesantren, dan bahkan banyak yang menekuni literatur pesantren. Sehingga dengan bekal tersebut dilakukan kerjasama secara kolektif agar bisa mencapai spirit bersama dengan kuat. Pada bulan Desember tahun 2017 PKPPN mengikuti *call for article* yang diselenggarakan oleh *foundation* dari Australia. Dari 84 peserta disaring menjadi 4 dan akhirnya PKPPN terpilih salah satunya yang mendapatkan bantuan dana. Program LISAN (literasi Islam santun) diinisiasi menjadi program awal dalam proyek tersebut. Untuk menjalankan program tersebut PKPPN bekerjasama dengan Solopos, Suara Merdeka, dan media lainnya. Namun akhirnya PKPPN bisa membuat website dengan nama islamsantun.org pada tahun 2019 dengan melihat potensi anggota dalam keahlian menulis yang kuat.

Keberhasilan yang dicapai PKPPN yaitu melakukan kampanye moderasi beragama secara digital selama dua bulan dengan membuat meme yang dibagi lewat Instagram, Twitter, dan sebagainya serta ada yang dicetak

menjadi sebuah buku. Selain itu PKPPN juga bergabung salam sindikat media Islam yaitu sekumpulan media Islam se-Indonesia yang membahas isu-isu sosial dan saling membantu dan berbagi dalam kegiatan yang dilakukan, media-media tersebut antara lain seperti NU online, Islam.com, Aisnusantara, dan lain sebagainya.

UIN Raden Mas Said mendukung PKPPN dalam menginisiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut terlihat dalam menyedikan tempat, fasilitas, keterlibatan dalam beberapa kegiatan yang diadakan PKPPN. PKPPN juga berjejaring dengan Wahid foundation dengan menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa UIN Raden Mas Said. Beasiswa ini diberikan kepada 4 mahasiswa yang dinilai selama ini ikut terlibat dalam kampanye promosi Islam santun dan memiliki kegiatan sosial baik di kampus dan di komunitas masing-masing. Oleh karena itu, syarat mendapatkan beasiswa tersebut tidak hanya berbasis catatan akademik tetapi juga pengamatan dari tim PKPPN selama setahun terakhir. Selain itu PKPPN juga bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika yang akhirnya bisa memberangkatkan anggotanya ke Amerika untuk kegiatan di sana, selain itu PKPPN juga mendelegasikan dua anggota ke Thailand karena PKPPN berhasil membuat FGD mengenai isu Islam yang ada di Soloraya. PKPPN juga bekerjasama dengan radio Gesma FM milik

pondok pesantren Al Muayyad dengan melakukan beberapa kegiatan Ramadhan, seperti *talkshow* setiap malam. Selain itu PKPPN juga melakukan kegiatan di Klaten bekerja sama dengan pondok pesantren di sana untuk melakukan kegiatan Islam *santri time* dengan melibatkan beberapa Madrasah Aliyah.

Sampai saat ini PKPPN mendapat dukungan dari lembaga di bawah Kementerian Agama untuk menginisiasi kegiatan. Sebelumnya PKPPN juga berhasil mengumpulkan siswa Madrasah Aliyah untuk menceritakan pengalaman keragaman yang kemudian disusun menjadi sebuah buku dan juga menerbitkan buku modul pendidikan karakter moderat bagi siswa RA, MI, MTs, dan MA. Kini PKPPN berubah nama menjadi Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) sehingga mampu memperluas cakupan kajian dan perannya dalam mensyiarkan Islam moderat (Redaksi 2018).

Berangkat dari inisiasi kultural tersebut, semangat moderasi Islam telah terbangun di UIN Raden Mas Said Surakarta tanpa harus menunggu komando dari Kementerian Agama dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Nilai-nilai moderat dan kekhasan pesantren jelas terimplementasi dalam beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh PKPPN.[]

Inisiasi PTKIN Dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

A. Inisiasi UIN Walisongo dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

1. Inisisasi Akademik

UIN Walisongo berkomitmen kuat dalam pengarusutamaan moderasi beragama di level akademik. Pertama, hal ini terlihat dalam agenda pimpinan UIN Walisongo menetapkan kurikulum 2020 dengan memberikan mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama pada mahasiswa semester 1. Berdasarkan observasi penulis, kebijakan ini dilaksanakan sejak semester gasal

tahun ajaran 2020/2021. Rumah Moderasi Beragama (RMB) merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah tersebut melalui workshop yang diikuti oleh dosen yang akan mengampu mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama sehingga diperoleh RPS yang selaras untuk diajarkan secara serempak kepada mahasiswa baru. Mukhsin Jamil selaku Wakil Rektor I bidang Akademik berharap agar mata kuliah ini mampu mencetak mahasiswa UIN Walisongo yang toleran, moderat, dan menyiarkan Islam *rahmatan lil 'alamin* dan mata kuliah ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam meneladani dakwah-dakwah khas Walisongo (Humas UIN Walisongo 2020d).

Dalam implementasi mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama, mahasiswa diajak untuk aktif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai moderat. Misalnya mahasiswa membuat konten-konten dalam media sosialnya baik berupa foto, video, maupun meme terkait dengan semangat moderasi beragama. Hal ini diharapkan mampu menjadi kontra narasi eksremisme maupun radikalisme yang marak di media sosial.

Kedua, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menginisiasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema moderasi beragama. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga dilakukan peserta KKN dari rumah masing-

masing. Dengan mengangkat tema tersebut, peserta KKN mengimplementasikan dalam kegiatan webinar moderasi beragama dengan topik-topik yang relevan misalnya moderasi beragama bagi kaum milenial, tantangan moderasi beragama di era 4.0, dan lain sebagainya. Pimpinan UIN Walisongo juga menyerukan kepada peserta KKN untuk kampanye virtual pengarusutamaan moderasi beragama melalui media sosial masing-masing. Hasilnya pun luar biasa karena mampu mencapai rekor MURI.

Sumber : http://lppm.walisongo.ac.id/

Menurut keterangan Wakil Rektor I UIN Walisongo, KKN didesain sebagai kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan kolaborasi antara pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan kebutuhan dan masalah di tengah masyarakat, menggunakan pendekatan interdisipliner maupun lintas disipliner yang disesuaikan dengan latar belakang keilmuan peserta KKN.

Kebijakan UIN Walisongo tentang KKN di masa pandemi dengan menumbuhkan kepedulian terhadap korban Covid-19 dan kesadaran moderasi beragama. Kegiatan KKN diharapkan mampu menyentuh aspek-aspek penguatan moderasi beragama untuk melawan munculnya gejala radikalisme dan ekstremisme yang mengancam keutuhan bangsa. Adapun metode KKN yang digunakan adalah secara umum peserta KKN mampu memobilisasi sumber daya yang ada di sekitar dan masyarakat untuk ikut bekerja sama guna mewujudkan perubahan yang lebih baik (Humas UIN Walisongo 2021b).

Ketiga, pimpinan UIN Walisongo berencana mengadakan workshop dan pelatihan. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan, rencana ke depan RMB ingin menjalankan moderasi media yaitu dengan cara membuat sayembara pada mahasiswa untuk membuat artikel atau konten-konten video yang berkaitan dengan moderasi beragama dan yang paling baik akan diunggah dalam website RMB dan akan diberikan *reward*. Selain itu RMB juga akan mengadakan kegiatan workshop kurikulum pendidikan moderasi untuk menghasilkan modul yang nantinya akan dijadikan bahan dalam *Training of Trainers* (ToT) moderasi beragama bagi civitas akademika UIN Walisongo. Selain itu, RMB juga menginisiasi pelatihan moderasi beragama bagi para

dosen umum, karyawan, dan aktivis mahasiswa. RMB juga membuat pantun-pantun yang berkaitan dengan moderasi beragama dan juga menulis artikel yang berkaitan tentang spirit moderasi beragama dalam rangka dies natalis UIN Walisongo di tahun 2020 lalu.

Sumber:https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?page_id=85

Keempat, RMB juga menyelenggarakan Webinar Moderasi Beragama dengan tema *Indigenous Religiosity* pada tanggal 15 Juli 2020. Dalam kegiatan tersebut RMB mengundang Lukman Hakim Saifudin, Yenny Wahid dan Prie GS. Dalam sambutannya, Rektor mengungkapkan bahwa pijakan lokalitas beragama dalam hidup berdampingan secara damai adalah Al-Qur'an. Selain itu, meneladani Nabi Muhammad dengan menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan penduduk Madinah

dengan cara saling berkolaborasi dan bersinergi antar lembaga dan *stakeholder* (Humas UIN Walisongo 2020b).

Sumber: https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=239

2. Inisiasi Non-Akademik

Rumah Moderasi Beragama bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo mengadakan kegiatan Halaqah Ulama pada 8 Februari 2021. Rektor dalam sambutannya menyatakan bahwa civitas akdemika UIN Walisongo harus memahami istilah moderasi beragama sebagai kebutuhan bersama, bukan hanya terhenti pada agenda pemerintah (Humas UIN Walisongo 2021a).

Sumber : https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=425

UIN Walisongo juga meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) "Unggahan Video Moderasi Beragama oleh Mahasiswa Terbanyak" dalam rangka peringatan Hari Santri. Dua piagam penghargaan MURI diserahkan kepada Rektor UIN Walisongo dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Rektor UIN Walisongo mengapresiasi penghargaan MURI ini, menurutnya penghargaan ini tidak hanya sebatas pengakuan saja akan tetapi harus menjadi makna yang mendalam dalam moderasi beragama. UIN Walisongo secara kelembagaan sangat berkomitmen untuk terus mengawal moderasi beragama

sebab makna moderasi beragama itu sendiri yaitu toleransi dan anti kekerasan. Menurutnya tradisi para Walisongo yang melekat di UIN Walisongo menjadi tolak ukur dalam menebar kedamaian, sehingga para dosen, pegawai, mahasiswa dan alumni selalu komitmen untuk jadi penebar perdamaian.

Sebelumnya, tim MURI memantau secara langsung dan menilai unggahan video moderasi beragama yang berjumlah 5.712 di YouTube dan Instagram pada tanggal 22 – 25 Oktober 2020. Video tersebut merupakan karya hasil unggahan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama. Wakil Rektor III UIN Walisongo berharap mahasiswa dapat mengambil hikmah hari santri ini sebagai teladan hidup agar cinta agama dan cinta negara. Semangat moderasi beragama ini akan menjadi akar kuat dalam menyatukan Indonesia, sehingga perdamaian dan persatuan selalu terjaga dengan baik hingga kapan pun. Dengan Rekor MURI tersebut menjadi pertanda bahwa mahasiswa UIN Walisongo siap menjadi santri dan penerus perjuangan Walisongo. Tema hari santri 2020 dan KKN yang mengusung moderasi beragama merupakan sebuah keniscayaan dalam pemahaman keagamaan di era milenial ini. Menurut Imam Yahya selaku Ketua RMB menilai bahwa kagiatan ini melibatkan *local wisdom* dalam memahami Islam,

merupakan ajaran Walisongo yang patut dijadikan sebagai *mainstream* dalam pemahaman keagamaan

kontemporer, karena *Islam shalihun likulli zamanin wamakanin*, abadi sepanjang waktu dan tempat (Humas UIN Walisongo 2020a).

Sumber : https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=236

UIN Walisongo meresmikan Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada 19 Desember 2019. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Fachrul Razi serta tokoh lintas agama se-kota Semarang. Menurut Rektor UIN Walisongo toleransi perdamaian, saling menyayangi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan. Hal inilah yang menjadikan UIN Walisongo membangun rumah moderasi beragama.

> "Membawa nama besar Walisongo, maka keberadaan UIN Walisongo diharap dapat

melahirkan sosok-sosok yang berperilaku santun, berdakwah dengan rahmat, dan tidak mengedepankan kekerasan. Dengan cara ini lah para walisongo dapat diterima oleh masyarakat,"

Saat ini UIN Walisongo tengah berkonsentrasi untuk menghasilkan alumni yang dapat memberi kontribusi bagi kemanusiaan dan peradaban. Moderasi beragama disampaikan dalam berbagai program yang ada di UIN Walisongo. Bahkan, pihak kampus telah memasukkan moderasi beragama sebagai bagian kurikulum terintegrasi di dalamnya.

Sumber : https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=233

Rektor dalam sambutannya menyatakan keragaman beragama adalah wujud keramahan Allah. Toleransi perdamaian saling menyayangi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan. Hal inilah yang menjadikan UIN

Walisongo membangun rumah moderasi (Humas UIN Walisongo 2019a). Berdakwah dengan santun tanpa kekersan yang mudah diterima oleh masyarakat. Keragaman merupakan wujud keramahan Tuhan Yang Maha Esa. Launching tersebut merupakan bentuk kontribusi meneguhkan NKRI, menjauhkan dari terorisme dan radikalisme, diseminasi perdamaian Islam yang ramah dan santun (Humas UIN Walisongo 2019b).

UIN Walisongo juga sering melibatkan tokoh lintas agama seperti tokoh Katolik, Konghucu, Budha, Hindu, dan Kristen dalam beberapa kegiatan Rumah Moderasi Beragama (RMB). Selain itu, RMB juga mengundang tokoh FKUB, MUI, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan ruang digital RMB menggunakan beberapa website yang dimiliki UIN Walisongo seperti walisongo TV, Radio, Teater UIN, dan juga YouTube UIN Walisongo. Hal tersebut bisa dicatat sebagai bentuk komitmen UIN Walisongo dalam pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi.

3. Tantangan dan Kendala dalam Pengarusutamaan Moderasi di UIN Walisongo

Ada beberapa kendala dalam mempromosikan Islam moderat di UIN Walisongo: pertama, di level kebijakan belum ditemukan dokumen terkait penguatan moderasi beragama di UIN Walisongo baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Induk Pengembangan (RIP).

Kedua, belum adanya buku ajar Islam dan Moderasi Beragama. Ini menunjukkan bahwa pimpinan UIN Walisongo belum sepenuhnya siap dalam memberikan mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama bagi mahasiswa. Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini Rumah Moderasi Beragama menyiapkan artikel pendek yang bisa digunakan sebagai bahan ajar berdasarkan RPS mata kuliah tersebut. Selain itu, para dosen pengampu juga diperkenankan melakukan modifikasi dalam proses kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kapasitas dan target mahasiswa yang diajar. Mekipun demikian, RMB terus berupaya untuk menyiapkan buku ajar sebagai pedoman mata kuliah tersebut.

Sedangkan tantangan yang dihadapi UIN Walisongo antara lain: seiring bertambahnya program studi baru di UIN Walisongo berbanding lurus dengan banyaknya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berlatar belakang pendidikan non pesantren sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman keagamaan. Hal tersebut menyebabkan pada pemikiran dan sikap eksklusif dalam beragama. Tidak jarang dalam pembelajaran mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama mahasiswa benar-benar masih asing dengan konsepsi Islam moderat dan beberapa istilah yang berkaitan dengannya. Ini menjadi tantangan bagi dosen yang mengampu mata kuliah tersebut karena sebisa mungkin

harus menyampaikan materi perkuliahan dengan bahasa yang mudah dipahami, contoh-contoh konkrit di lingkungan sekitar, dan analogi-analogi yang bisa diterima kalangan awam.

B. Inisiasi UIN Raden Mas Said Surakarta dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

1. Inisisasi Akademik

Dalam panduan kurikulum menjelaskan bahwa nilai moderasi harus masuk ke dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan cara insersi/menyisipkan nilai moderasi beragama dalam setiap mata kuliah yang diajarkan. Pimpinan UIN Raden Mas Said Surakarta memberikan kebijakan tersebut kepada para dosen yang mengampu mata kuliah melalui penerbitan Surat Keputusan (SK). Meskipun pimpinan belum pernah mengadakan pelatihan insersi nilai moderasi dalam setiap perkuliahan kepada para dosen, namun prakteknya sudah bisa dilaksanakan dengan kreasi dosen masing-masing sejak semester genap tahun ajaran 2020/2021. Pimpinan masih terbatas melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. Pimpinan UIN Raden Mas Said Surakarta bekerja sama dengan RMB menjadi otoritas moderasi yang dilajutkan sampai level prodi misalnya mengawal insersi RPS. Beberapa inisiasi akademik yang dilakukan antara lain:

Pertama, Di Fakultas Adab dan Bahasa ada mata kuliah khusus yang secara eksplisit memuat moderasi beragama yaitu Wawasan Moderasi Beragama yang diajarkan pertama kali pada angkatan 2020 (sekarang mahasiswa semester 3). Hal ini menjadi satu terobosan fakultas yang menjadi distingsi dari fakultas lain yang digagas oleh Prof. Totok jauh sebelum Lukman Hakim Saifuddin menyuarakan moderasi. Sedangkan fakutas lain memberikan materi moderasi dengan cara insersi nilai-nilai moderat ke dalam mata kuliah yang merupakan implementasi konsepsi integrasi interkoneksi. Sampai saat ini belum ada inisiasi menjadikan Wawasan Moderasi Beragama menjadi mata kuliah yang diajarkan di semua fakultas di UIN Raden Mas Said Surakarta karena pimpinan belum memutuskan bahwa mata kuliah tersebut menjadi suatu keharusan. Sehingga saat ini semua fakultas masih bertahan pada konsep insersi nilai moderat dalam setiap mata kuliah.

Selain itu, Kementerian Agama menyelenggarakan workshop penguatan Moderasi Beragama bagi PTKI. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Allium Tangerang pada tanggal 3 – 5 Mei 2021. Acara tersebut dihadiri oleh 34 PTKI Se-Indonesia yang sudah memiliki Rumah Moderasi Beragama di kampus masing-masing dan beberapa diantaranya sedang dalam proses mengupayakan Rumah Moderasi di 52 PTKI diseluruh

Indonesia. Lukman Hakim Saifuddin hadir dalam acara tersebut yang juga merupakan inisiator Moderasi Bergama. Ada 3 poin yang dibahas pada pertemuan tersebut. Pertama, bagaimana penguatan Moderasi Bergama diimplementasikan di PTKI. Kedua, inisiasi program Kuliah Kerja Nyata berbasis Moderasi Beragama (KKN-MB) yang diselenggarakan di masing-masing PTKI. Ketiga, sesi sharing dengan pimpinan Rumah Moderasi Beragama se-Indonesia dalam menginisiasi kegiatan agar selaras dengan tujuan Kementerian, dengan tujuan yaitu hasilnya nanti dapat dilaporkan secara terukur karena telah masuk RPJMN. Selain itu juga dibentuk forum Rumah Moderasi Se-Indonesia dengan menunjuk Ahmad Zainul Hamdi sebagai ketua dari UIN Sunan Ampel Surabaya (Humas UIN Raden Mas Said 2021a).

UIN Raden Mas Said Surakarta telah menginisiasi program KKN dengan tema Kerso Darma atau Kerja Sosial, Daring Dari Rumah. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh LP2M. Selain itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta pada 20 Maret 2020. Kegitan tersebut ditujukan kepada para *khatib* muda. Peserta kegiatan tersebut antara lain pemuda dari Wonogiri dan sekitarnya, seperti kecamatan Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, dan Ronkop-Gunung Kidul. Kegiatan

dilaksanakan di Aula SD Muhammadiyah Program Khusus Kabupaten Wonogiri (Humas UIN Raden Mas Said 2021b).

2. Inisiasi Non-Akademik

Rumah Moderasi Beragama UIN Raden Mas Said Surakarta turut aktif dalam acara workshop RMB se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama menginstruksikan kepada Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Fuad Hasyim ditunjuk sebagai ketua RMB UIN Raden Mas Said Surakarta pada awal tahun 2021. Ia menyampaikan bahwa RMB baru menyusun rencana, pertama kegiatan internal yaitu penguatan moderasi beragama bagi civitas akademika sebagai upaya preventif mencegah radikalisme dan intoleransi di lingkungan kampus. Kedua, kegiatan eksternal yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk memberikan workshop kepada Penyuluh Agama se-Soloraya dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Kedua rencana tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang (Humas UIN Raden Mas Said 2021a).

Selain itu, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki taman moderasi yang diresmikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar melalui penandatanganan prasasti. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta menyampaikan dalam sambutannya bahwa

taman moderasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan simbol yang mengingatkan bahwa civitas akademika UIN Raden Mas Said merupakan agen Moderasi Islam dan hal tersebut menjadi langkah konkrit yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa yang bisa digunakan sebagai tempat berkumpulnya civitas akademika multikultural di Surakarta (Andrios 2021).

Sumber : https://kemenag.go.id/read/uin-raden-mas-said-surakarta-kini-miliki-taman-moderasi-rxevy

Lebih jauh DEMA IAIN Surakarta menyelenggarakan Dialog Lintas Agama bertemakan "Moderasi Beragama Sebagai Tonggak Persatuan dalam Kebinekaan" pada hari Selasa 20 April 2021. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Budaya Solo Raya GKJ Dagen Palur di Graha IAIN Surakarta dan Unit Pelayanan Mahasiswa Lintas Agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara online dan offline yang dihadiri oleh

80 peserta offline dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan 260 peserta online yang mengikuti channel YouTube DEMA IAIN Surakarta. Rektor menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran dalam menginisiasi seminar-seminar dalam berbagai tema aktual. Selain itu, media sosial juga diharapkan bisa digunakan untuk menebarkan kebaikan, bukan ujaran kebencian agar tercipta perdamaian dan *rahmatan lil alamin* (Widodo 2021).

3. Tantangan dan Kendala dalam Pengarusutamaan Moderasi di UIN Raden Mas Said Surakarta

UIN Raden Mas Said Surakarta tentunya memiliki kendala dan tantangan dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Adapun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Hal tersebut dikarenakan Rumah Moderasi Beragama bukanlah lembaga formal di kampus tersebut sehingga tidak memiliki slot anggaran secara mandiri. Tahun ini RMB telah menyiapkan banyak kegiatan namun kenyataannya sepanjang tahun 2021 RMB tidak memiliki kegiatan besar sehingga kegiatan yang direncanakan baru akan berjalan dengan anggaran tahun 2022. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara menempel ke unit lain yang memiliki anggaran seperti kemahasiswaan atau kepegawaian dalam mengadakan seminar, workshop ataupun kegiatan lainnya. Menurut informasi yang didapatkan, dosen, mahasiswa, dan

tenaga kependidikan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait penguatan moderasi beragama. Sejauh ini mereka hanya mendengar istilah tersebut namun tidak mengetahui maksudnya. Bagi dosen mungkin sudah beberapa kali mendengar dan menjadi tugas khusus ketika ada pemberitahuan insersi nilai moderasi dalam setiap mata kuliah ketika rapat jadwal. Begitu juga mahasiswa yang belum memiliki akses yang memadai terkait pemahaman moderasi beragama karena belum adanya sosialisasi atau pelatihan bagi angkatan 2019 ke atas mengingat kebijakan insersi mata kuliah dan pemberian mata kuliah khusus moderasi beragama dimulai dari angkatan 2020.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh UIN Raden Mas Said Surakarta adalah kondisi sosiologis Soloraya yang cenderung memiliki pemahaman agama yang ekstrem dibandingan daerah lainnya. Dengan adanya penguatan moderasi beragama diharapkan mampu mencegah masuknya ekstremisme dan radikalisme di lingkungan kampus.

4. Peran Strategis UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta

Berangkat dari konteks UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta serta basis argumentasi yang digunakan dalam penguatan moderasi beragama di masing-masing kampus tersebut, penulis

akan melihat peran strategis keduanya dalam perspektif Sosiologis. Menurut Biddle dan Thomas, peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang memiliki status tertentu pada masyarakat. Seseorang yang memiliki status tertentu di masyarakat diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya (Amin and Yani 2017). Dalam konteks sosial, peran diartikan sebagai suatu fungsi dalam struktur sosial yang dimiliki oleh seseorang yang menjalankannya (Suhardono 1994).

Peran menjadi sebuah perilaku yang diharapkan oleh lingkungan untuk dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atas status yang diduduki yang mana dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Pada kajian ini, kampus memiliki status sebagai lembaga yang konsen pada implementasi moderasi beragama di kalangan civitas akademika sehingga dari peran tersebut diharapkan dapat membentuk karakter mereka, yang mana kampus memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankankan perannya sebagai lembaga.

Hubungan antara aktor satu dengan yang lainnya disebut interaksi sosial yang mana membagi dua golongan sebagai berikut,

1. Aktor (pelaku) yaitu seseorang yang sedang menjalankan suatu peran.

2. Target (sasaran) yaitu orang lain yang memiliki hubungan dengan aktor atas perilakunya.

Dalam kajian ini yang berperan sebagai aktor adalah pimpinan UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta dan yang menjadi target adalah civitas akademika kedua kampus tersebut. Biddle dan Thomas menggunakan empat indikator dalam mengidentifikasi suatu peran yaitu harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi.

Dalam konteks ini bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, harapan (*expectation*). Harapan tentang peran merupakan harapan orang lain tentang perilaku yang sesuai yang dilakukan seseorang yang memiliki sebuah peran tertentu. Harapan berlaku secara umum baik harapan dari seseorang maupun sekelompok orang. Dalam hal ini kampus diharapkan memiliki konsepsi moderasi beragama yang jelas dan mampu dipahami oleh civitas akademika sehingga mampu menginisiasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mempromosikan nilai-nilai moderat. UIN Walisongo Semarang belum memiliki basis argumentasi yang kuat dalam implementasi moderasi beragama di kampus tersebut. Sedangkan UIN Raden Mas Said Surakarta telah menuangkan semangat moderasi secara eksplisit dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) yaitu terkait dengan kompetensi lulusan harus mampu menjadi

ibadurrahman yang salah satu karakternya merujuk pada sikap moderat.

Meski demikian, UIN Walisongo memiliki basis argumentasi kultural dalam penguatan moderasi beragama seperti terlihat dari larangan penggunaan cadar, kemudian beberapa aturan-aturan yang di terapkan UIN Walisongo yang menentang anti pancasila dan akomodatif dalam prinsip walisongo yang menerapkan kearifan lokal (*local wisdom*). Selain itu, beberapa dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dengan mengajak mahasiswa untuk *field trip* ke gereja bertemu dan berdiskusi dengan pemeluk agama lain agar mahasiswa mampu menggunakan perspektif yang tepat ketika dihadapkan dengan pemeluk agama yang berbeda. Selain itu, kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh salah satu prodi di UIN Walisongo dengan mengunjungi Omah Petruk yang dikelola oleh para Romo dan Frater Katolik di Yogyakarta.

Indikator kedua dari teori peran adalah norma. Menurut Secord dan Backman, norma merupakan salah satu bentuk harapan yang bersifat meramalkan perilaku seseorang yang akan terjadi (*anticipatory*). Ada jenis harapan lain yaitu harapan normative (*role expectation*) yang artinya kewajiban yang dilekatkan pada suatu peran. Harapan jenis kedua ini dibagi lagi menjadi dua yaitu harapan yang ada namun tidak diucapkan, dan harapan

yang secara terang diungkapkan yang seringkali disebut tuntutan peran di mana harapan ini menjadi norma yang diinternalisasi.

Pada kajian ini, kampus memiliki norma yang diberlakukan bagi civitas akademika untuk menanamkan nilai-nilai harapan yang nantinya diimplementasikan oleh mereka. Jauh sebelum Kementerian Agama menggaungkan moderasi beragama, UIN Walisongo telah menerapkan semangat moderasi misalnya dalam hal larangan penggunaan cadar. Menurut informasi yang penulis dapatkan, hal tersebut merupakan sebuah langkah preventif untuk mengantisipasi dan mencegah radikalisme karena pada umumnya orang yang bercadar pasti memiliki ideologi oleh sebab itu pimpinan berusaha mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Semangat pengarusutamaan moderasi bertujuan untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme masuk ke UIN Walisongo.

Selain itu, beberapa kebijakan UIN Walisongo tegas dalam menentang anti pancasila dan akomodatif dalam prinsip walisongo yang menerapkan kearifan lokal (*local wisdom*). Dengan menyadari bahwa potensi ekstremisme dan radikalisme selalu muncul, maka pimpinan UIN Walisongo dalam menyeleksi calon pegawai maupun dosen dengan melakukan wawancara terkait wawasan kebangsaan dan pancasila karena proses tersebut merupakan filter utama civitas akademika memasuki UIN

Walisongo. Sedangkan di UIN Raden Mas Said Surakarta mempunyai basis argumen kultural berupa implementasi nilai-nilai moderat dan kekhasan pesantren yang diinisiasi oleh PKPPN melalui berbagai kegiatan baik lokal, nasional, maupun internasional.

Masih terkait dengan norma, ada jenis harapan lain yaitu harapan normatif (*role expectation*) yang artinya kewajiban yang dilekatkan pada suatu peran. Kementerian Agama memberikan empat indikator moderasi sehingga keempat indikator tersebut menjadi suatu norma yang harapannya mampu diinternalisasi oleh seluruh elemen. Adapun empat indikator tersebut antara lain: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) antikekerasan; dan 4) penerimaan kebudayaan lokal.

5. Peran Strategis dalam Penguatan Moderasi Beragama

Dalam konteks inisiasi kegiatan yang dilakukan oleh kedua kampus tersebut, penulis menggunakan dua indikator terakhir dalam teori peran. Wujud perilaku (*performance*) merupakan indikator ketiga dari teori peran. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata dan beragam, bukan sekadar sebuah harapan. Keragaman wujud perilaku tidak ada batasannya tergantung dari motivasi yang dibangun dan juga tujuan akhir yang ingin dicapai selama tidak bertentangan dengan nilai yang berlaku. Wujud perilaku dalam konteks ini kampus

melalui RMB secara aktif menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kampanye moderasi beragama dengan intensitas yang tinggi, kemudian dilanjutkan oleh agen-agen moderasi antara lain dosen pengampu mata kuliah maupun pimpinan kampus.

Inisiasi kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilakukan oleh UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan bukti bahwa kedua kampus tersebut berperan dalam pengarusutamaan moderasi beragama di wilayah masing-masing. Bukti keragaman inisiasi kegiatan tersebut merupakan wujud perilaku (*performance*) dalam teori peran. Motivasi yang dibangun dalam menginisiasi kegiatan, komitmen pimpinan, serta tujuan yang ingin dicapai bermuara pada pengarusutamaan moderasi beragama.

Indikator keempat adalah penilaian dan sanksi yang didasarkan kepada penilaian positif atau negatif yang diberikan kepada orang lain, sedangkan sanksi merupakan upaya untuk memperbaiki yang dianggap buruk dan mempertahankan suatu nilai positif, sehingga hal yang buruk tersebut diarahkan menjadi baik. Ukurannya terletak pada harapan kolektif yang disepakati sebagai norma. Kesan positif maupun negatif akan terbentuk ketika masyarakat melihat peran yang dilakukan oleh aktor. Dalam hal ini, civitas akademika memiliki hak untuk menilai bagaimana kampus

menyuarakan moderasi beragama melalui perilaku civitas akademika, sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama atau belum. Kemudian apabila terdapat warga kampus yang tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk memberikan sanksi agar dapat membenahi perilaku yang dianggap buruk menjadi baik. Penilaian dan sanksi ini bisa berasal dari luar diri yang mana peran tersebut ditentukan oleh orang lain, dan juga bisa berasal dari dalam diri sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

Merton dan Kitt berpendapat bahwa orang membutuhkan rujukan dalam hal pemberian penilaian dan sanksi. Rujukan terseebut antara lain:

1. Fungsi normatif, dalam hal ini kelompok referensi/ rujukan menetapkan standar khusus bagi anggotanya dalam menjalankan peran. Misalnya UIN Walisongo mengikuti indikator moderat sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Kementerian Agama. Maka ketika seorang dosen yang terindikasi memiliki pemahaman yang ekstrem dalam beragama akan mudah terdeteksi melalui caranya bersosialisasi atau media sosial yang digunakan sehingga pimpinan kampus akan menindaklanjuti hal tersebut.
2. Fungsi perbandingan, artinya kelompok referensi/ rujukan diposisikan sebagai alat komparasi untuk

mengukur apakah perannya sudah benar atau belum. Misalnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama di UIN Walisongo sering kali bertanya apakah sikapnya sudah moderat atau belum; atau mereka juga bertanya bagaimana cara menjadi muslim yang moderat; bahkan tidak jarang mereka bercerita tentang pengalamannya bersinggungan dengan penganut *madzhab* yang berbeda atau umat agama lain di lingkungan tempat tinggalnya serta bagaimana mereka menyikapinya selama ini kemudian dijadikan bahan refleksi dan evaluasi dari teori-teori yang mereka dapatkan di kelas Islam dan Moderasi Beragama.

6. Inisiasi Kegiatan dalam Indikator Moderasi Kementerian Agama

Kementerian Agama beragama telah menentukan indikator atau ukuran dalam pengamalan moderasi: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) penerimaan kebudayaan lokal (Balitbang Kemenag 2019a). Komitmen kebangsaan merupakan indikator utama untuk mengukur perspektif dan cara beragama seseorang terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara beserta turunannya dan sikap nasionalisme. Inisiasi yang telah dilakukan kedua kampus tersebut antara lain: memberikan mata kuliah moderasi beragama, menginisiasi KKN bertemakan moderasi,

mengadakan seminar bertema moderasi dengan mengundang tokoh nasional yang moderat. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen kebangsaan dalam memberikan pemahaman terkait penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara sehingga mampu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator kedua yakni toleransi dengan cara memberikan ruang terhadap hak orang lain untuk dalam berkeyakinan dan beribadah meskipun berbeda dengan keyakinan sendiri. Toleransi berkaitan dengan sikap terbuka, disertai dengan sikap hormat, menerima perbedaan dan berpikir positif. Aspek toleransi tidak hanya masalah keyakinan agama, namun juga berhubungan dengan perbedaan suku, budaya, ras, dan sebagainya. Dalam hal ini toleransi beragama yang ditekankan adalah toleransi intra agama dan toleransi antaragama yang berkaitan dengan aspek sosial maupun politik. Misalnya diskusi lintas iman, *filed trip* ke tempat ibadah umat agama lain merupakan bentuk inisiasi membangun toleransi kepada orang lain yang berbeda keyakinan.

Indikator ketiga adalah anti-kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini diartikan sebagai suatu ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan caracara yang berlebihan atas nama agama, baik secara fisik, verbal, dan pikiran.

Radikalisme atau kekerasan ini sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya terwujud, termasuk menyakiti pihak yang tidak sepaham. Meskipun radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tersebut, tetapi bisa juga melekat pada semua agama. Radikalisme biasanya muncul karena ketidakadilan dan keterancaman yang dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ia akan lahir secara ideologis dengan memupuk kebencian terhadap kelompok yang dianggap oposisi dan menyebabkan ketidakadilan yang mengancam identitasnya. Misalnya mengkampanyekan moderasi melalui media sosial.

Keempat, indikator moderasi adalah penerimaan terhadap budaya lokal untuk melihat sejauh mana seseorang mampu menerima praktik agama yang mengakomodasi kearifan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat cenderung mudah dalam menerima budaya lokal terkait dengan cara beragamanya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, ada kelompok yang tidak akomodatif terhadap kearifan lokal karena dianggap sebagai suatu hal yang menciderai kemurnian agama. Misalnya dalam rangka dies natalis UIN Walisongo ke-51, para dosen menulis dalam buku bunga rampai dengan tema moderasi Walisongo. Ada 51

tulisan pendek yang terkumpul dalam buku bunga rampai tersebut. Tujuannya adalah agar ide segar terkait strategi maupun konsepsi dialog Islam dan tradisi mampu disebarluaskan kepada civitas akademika maupun masyarakat secara luas sehingga kesadaran dan penerimaan terhadap kearifan lokal tidak dianggap bertentangan dengan semangat moderasi beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh walisongo dalam mendakwahkan Islam di Indonesia.

7. Perbedaan Pengarusutamaan Moderasi Beragama di UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said

Pengarusutamaan moderasi beragama di UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said memiliki beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan tersebut terletak pada target yang disasar oleh kedua kampus tersebut dalam kegiatan yang diinisiasi oleh keduaanya. UIN Raden Mas Said tidak hanya konsen pada internal civitas akdemika kampus, tapi secara konkrit mampu menggandeng kerja sama dengan eksternal misalnya siswa SMA atau madrasah yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi sosiologis yang menguatkan bahwa Soloraya memiliki kecenderungan adanya paham ekstrem maupun radikal. Sedangkan UIN Walisongo masih konsen pada internal kampus dalam upaya pengarusutamaan moderasi beragama seperti mengajarkan mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama

bagi mahasiswa angkatan 2020 dan 2021, memberikan workshop kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut, serta memberikan *Training of Trainers* (ToT) yang direncakan dalam waktu dekat.

Kedua, perbedaan indikator yang digunakan dalam pengarusutamaan moderasi di masing-masing kampus. UIN Walisongo menggunakan indikator yang digagas oleh Kementerian Agama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan kearifan local. Sedangkan UIN Raden Mas Said menggunakan indikator yang digagas oleh Ma'ruf Amin antara lain: ke-Indonesia-an dalam arti penerimaan PBNU (Pancasila, Bhineka, NKRI dan UUD), anti-kekerasan, toleran, dan penerimaan budaya lokal.

Ketiga, perbedaan pengajaran mata kuliah moderasi beragama. Kebijakan di UIN Walisongo memberikan mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama kepada seluruh mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2021. Mata kuliah tersebut diwajibkan bagi mahasiswa semester 1. Sedangkan di kebijakan di UIN Raden Mas Said memberikan mata kuliah Wawasan Moderasi hanya terbatas di Fakultas Adab dan Bahasa (FAB) bagi mahasiswa semester 3 yaitu dimulai dari angkatan 2020. Sedangkan implementasi di fakultas lainnya mengacu pada kebijakan insersi nilai moderasi beragama di setiap

mata kuliah yang terlihat dari RPS mata kuliah masing-masing.

Keempat, perbedaan basis argumentasi teologis yang digunakan. UIN Walisongo tidak mencantumkan basis argumentasi teologis impelementasi moderasi beragama di dalam dokumen universitas. Sedangkan UIN Raden Mas Said mencantumkan basis argumentasi teologisnya di dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) universitas tersebut.

8. Hegemoni Pemerintah dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Berdasarkan datat-data yang telah diperoleh, penulis menemukan adanya pola hegemoni dalam pengarusutamaan moderasi beragama di PTKIN. Gramsci menjelaskan hegemoni sebagai sebuah proses mendapatkan kekuasaaan yang ketika masa dominan sudah mendapatkan kekuasaan negara maka kekuasaan dalam genggamanya harus tetap dipertahankan dengan gigih dan harus terus-menerus diperjuangkan (Simon 1999). Sehingga hegemoni kekuasaan harus terus-menerus diproduksi untuk tetap mempertahankan hegemoni oleh kelas yang berkuasa degan pembuatan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial yang terus berubah serta merespon aktifitas kekuatan oposisi dengan bantuan dari kaum intelektual (Faruk 2010).

Gramsci beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. Hal ini tampak pada agenda pemerintah terkait dengan pencegahan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia kemudian digaungkan oleh Kementerian Agama melalui penguatan moderasi beragama. Kementerian Agama memberikan mandat kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam mensukseskan agenda tersebut salah satunya dengan membentuk Rumah Moderasi Beragama (RMB) di setiap PTKIN. Perangkat kerja hegemoni yang kedua menurut Gramsci adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto 1997).

Dengan argumentasi bahwa penguatan moderasi beragama menjadi tanggung jawab bersama di bawah Kementerian Agama maka elemen masyarakat taat terhadap kebijakan tersebut. Padahal PTKIN memiliki

kultur yang telah lama diinternalisasi jauh sebelum Kementerian Agama memberikan mandat penguatan moderasi beragama.

Hegemoni dikatakan berhasil jika seorang mampu berkuasa atas kelas yang ada di bawah daripada yang berkuasa. Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa kepada kelas yang dikuasai, penguasa tersebut memiliki kekuasaan atas pengetahuan sehingga mampu menginternalisasi ideologi yang lebih dominan mampu memberikan pengetahuanya kepada orang yang dikuasai sehingga terjadilah kekuasaan atas pengetahuan antara kelas penguasa pengetahuan sehingga terjadilah hegemoni di dalamnya.

UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said memiliki basis argumentasi teologis maupun kultural dalam implementasi moderasi beragama. Namun ketika Kementerian Agama memberikan mandat tersebut seolah agama Islam terpisah dari moderasi beragama. Misalnya adanya mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama terkesan Islam merupakan entitas terpisah dari moderasi. Padahal agama Islam sudah moderat. Kebijakan memberikan mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama di UIN Walisongo merespon mandate Kementerian Agama dalam mengkampanyekan moderasi Islam. Kebijakan tersebut terkesan terlalu tergopoh-gopoh seperti halnya dalam merespon pendidikan anti-korupsi

dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Semakin kuat disuarakan antara Islam dan moderasi maka justru makin kuat memisahkan keduanya, payahnya hal ini tidak disadari oleh elemen masyarakat. Inilah hegemoni yang terjadi dalam penguatan moderasi beragama.[]

Kesimpulan

A. Basis Argumentasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Dalam implementasi pengarusutamaan moderasi beragama, UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki basis argumentasi teologis maupun kultural. UIN Walisongo Semarang dalam pengarusutamaan moderasi beragama menggunakan basis argumentasi teologis surat al-Baqarah ayat 143.

> *"wa każālika ja'alnākum ummataw wasaṭal litakụnụ syuhadā`a 'alan-nāsi wa yakụnar-rasụlu 'alaikum syahīdā, wa mā ja'alnal-qiblatallatī kunta 'alaihā illā lina'lama may yattabi'ur-rasụla mim may yangqalibu 'alā 'aqibaīh, wa ing kānat lakabīratan illā 'alallażīna*

hadallāh, wa mā kānallāhu liyuḍī'a īmānakum, innallāha bin-nāsi lara`ụfur raḥīm"

Ketika seseorang ingin mempurifikasi Islam, kembalinya ke Islam yang moderat bukan ke Islam yang radikal dan dalam lafadz *jaalna* dalam ayat tersebut berarti *fi'il madhi* "kita sudah menjadikanmu sebagai *ummatan wasathan*" dan konsep *washatan* itu dikaitkan dengan hadist Nabi yang juga menjadi dasar atau dalil yang digunakan yaitu "sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah". Maka *wasathan* diartikan yang terbaik karena yang tengah yang paling baik.

Selain argumentasi teologis, UIN Walisongo juga memiliki basis argumentasi kultural. Argumentasi ini menguatkan bahwa praktek moderasi beragama telah dilakukan oleh UIN Walisongo berdasarkan kebiasaan yang telah lama dipraktekkan. Sebelum Kementerian Agama menggaungkan moderasi beragama, UIN Walisongo telah menerapkan semangat moderasi misalnya dalam hal larangan penggunaan cadar, kemudian beberapa aturan-aturan yang di terapkan UIN Walisongo yang menentang anti-Pancasila dan akomodatif dalam prinsip walisongo yang menerapkan kearifan lokal (*local wisdom*). Selain itu, beberapa dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dengan perspektif yang terbuka. Dalam mata kuliah Dialog Antar Agama misalnya, dosen tidak hanya memberikan teori dan

presentasi di depan kelas, namun juga mengajak mahasiswa untuk *field trip* ke gereja bertemu dan berdiskusi dengan pemeluk agama lain. Mahasiswa antusias dalam kegiatan yang diinisiasi oleh dosen tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya dosen dan mahasiswa yang kemudian aktif menjadi pegiat lintas agama di kota Semarang.

Kegiatan lain yang serupa adalah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh salah satu prodi di UIN Walisongo dengan mengunjungi Omah Petruk yang dikelola oleh para Romo dan Frater Katolik di Yogyakarta. Mahasiswa belajar terkait dengan filsafat dan perspektif baru yang diajarkan oleh pemuka agama Katolik. Selain itu, kegiatan-kegiatan dialog lintas iman juga sering kali diselenggarakan oleh program studi tertentu di UIN Walisongo misalnya program studi Studi Agama-Agama. Basis argumentasi kultural tersebut diinisiasi oleh *grass root* yang bersifat *bottom up*, yaitu gagasan tersebut berasal dari dari mahasiswa dan dosen kemudian melibatkan civitas akademika lainnya dalam kegiatan tersebut.

Adapun basis argumentasi teologis UIN Raden Mas Said Surakarta yang tertulis dalam dalam Rencana Induk Pengembangan, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki profil lulusan yang berkarakter *ibadurrahman* yaitu alumni yang memiliki integritas tinggi, mampu bersikap

dan berpikir kritis progresif, memiliki semangat perjuangan yang luhur, dan memiliki kepribadian yang humanis dan moderat (Tim Senat 2020).

Sedangkan dalam basis argumentasi kultural, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki pusat kajian bernama Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara (PKPPN) yang diresmikan pada tahun 2017. Para dosen yang bergabung dalam PKPPN bekerja berdasarkan spirit untuk memberikan transformasi nilai budaya dalam pesantren agar bisa menjadi bagian dari civitas akademika, serta agar dapat mengorganisir nilai-nilai individu di lingkungan kampus menjadi lebih baik.

PKPPN juga memanfaatkan jaringan dari para anggota yang ada di dalamnya karena sebagian dari mereka ada yang berlatar belakang aktivis NGO, pondok pesantren, dan bahkan banyak yang menekuni literatur pesantren. Program LISAN (literasi Islam santun) diinisiasi menjadi program awal dalam proyek tersebut. PKPPN juga melakukan kampanye moderasi beragama secara digital selama dua bulan dengan membuat meme yang dibagi lewat Instagram, Twitter, dan sebagainya serta ada yang dicetak menjadi beberapa judul buku.

B. Bentuk Inisiasi Kegiatan dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Dalam kajian ini yang berperan sebagai aktor adalah pimpinan UIN Walisongo Semarang dan UIN Raden Mas Said Surakarta, sedangkan yang menjadi target adalah civitas akademika kedua kampus tersebut. Biddle dan Thomas menggunakan empat indikator dalam mengidentifikasi suatu peran yaitu harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi.

Dalam konteks ini bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, harapan (*expectation*). Harapan tentang peran merupakan harapan orang lain tentang perilaku yang sesuai yang dilakukan seseorang yang memiliki sebuah peran tertentu. Harapan berlaku secara umum baik harapan dari seseorang maupun sekelompok orang. Dalam hal ini kampus diharapkan memiliki konsepsi moderasi beragama yang jelas dan mampu dipahami oleh civitas akademika sehingga mampu menginisiasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mempromosikan nilai-nilai moderat. UIN Walisongo Semarang belum memiliki basis argumentasi yang kuat dalam implementasi moderasi beragama di kampus tersebut. Sedangkan UIN Raden Mas Said Surakarta telah menuangkan semangat moderasi secara eksplisit dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) yaitu terkait dengan kompetensi lulusan harus mampu menjadi

ibadurrahman yang salah satu karakternya merujuk pada sikap moderat.

Indikator kedua dari teori peran adalah norma. Menurut Secord dan Backman, norma merupakan salah satu bentuk harapan yang bersifat meramalkan perilaku seseorang yang akan terjadi (*anticipatory*). Ada jenis harapan lain yaitu harapan normatif (*role expectation*) yang artinya kewajiban yang dilekatkan pada suatu peran. Pada penelitian ini, kampus memiliki norma yang berlaku bagi civitas akademika untuk menanamkan nilai-nilai harapan yang diharapkan bisa diimplementasikan. Kementerian Agama memberikan empat indikator moderasi sehingga keempat indikator tersebut menjadi suatu norma yang harapannya mampu diinternalisasi oleh seluruh elemen. Adapun empat indikator tersebut antara lain: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) penerimaan kebudayaan lokal.

Dalam konteks inisiasi kegiatan yang dilakukan oleh kedua kampus tersebut, penulis menggunakan dua indikator terakhir dalam teori peran. Wujud perilaku (*performance*) merupakan indikator ketiga dari teori peran. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata dan beragam, bukan sekadar sebuah harapan. Keragaman wujud perilaku tidak ada batasannya tergantung dari motivasi yang dibangun dan juga tujuan akhir yang ingin dicapai selama tidak bertentangan dengan nilai yang

berlaku. Wujud perilaku dalam konteks ini kampus melalui RMB secara aktif menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kampanye moderasi beragama dengan intensitas yang tinggi, kemudian dilanjutkan oleh agen-agen moderasi antara lain dosen pengampu mata kuliah maupun pimpinan kampus.

Inisiasi kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilakukan oleh UIN Walisongo dan UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan bukti bahwa kedua kampus tersebut berperan dalam pengarusutamaan moderasi beragama di wilayah masing-masing. Bukti keragaman inisiasi kegiatan tersebut merupakan wujud perilaku (*performance*) dalam teori peran. Motivasi yang dibangun dalam menginisiasi kegiatan, komitmen pimpinan, serta tujuan yang ingin dicapai bermuara pada pengarusutamaan moderasi beragama.

Indikator keempat adalah penilaian dan sanksi yang didasarkan kepada penilaian positif atau negatif yang diberikan kepada orang lain, dan sanksi merupakan upaya untuk memperbaiki yang dianggap buruk dan mempertahankan suatu nilai positif, sehingga hal yang buruk tersebut diarahkan menjadi baik. Ukurannya terletak pada harapan kolektif yang disepakati sebagai norma.

Kementerian Agama beragama telah menentukan indikator atau ukuran dalam pengamalan moderasi: 1)

komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) penerimaan kebudayaan lokal (Balitbang Kemenag 2019a). Komitmen kebangsaan merupakan indikator utama untuk mengukur perspektif dan cara beragama seseorang terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara beserta turunannya dan sikap nasionalisme. Inisiasi yang telah dilakukan kedua kampus tersebut antara lain: memberikan mata kuliah moderasi beragama, menginisiasi KKN bertemakan moderasi, mengadakan seminar bertema moderasi dengan mengundang tokoh nasional yang moderat. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen kebangsaan dalam memberikan pemahaman terkait penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara sehingga mampu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator kedua yakni toleransi dengan cara memberikan ruang terhadap hak orang lain untuk dalam berkeyakinan dan beribadah meskipun berbeda dengan keyakinan sendiri. Toleransi berkaitan dengan sikap terbuka, disertai dengan sikap hormat, menerima perbedaan dan berpikir positif. Aspek toleransi tidak hanya masalah keyakinan agama, namun juga berhubungan dengan perbedaan suku, budaya, ras, dan sebagainya. Dalam hal ini toleransi beragama yang ditekankan adalah toleransi intra agama dan toleransi antaragama yang berkaitan dengan aspek sosial maupun

politik. Misalnya diskusi lintas iman, *filed trip* ke tempat ibadah umat agama lain merupakan bentuk inisiasi membangun toleransi kepada orang lain yang berbeda keyakinan.

Indikator ketiga adalah anti-kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini diartikan sebagai suatu ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang berlebihan atas nama agama, baik secara fisik, verbal, dan pikiran. Radikalisme atau kekerasan ini sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya terwujud, termasuk menyakiti pihak yang tidak sepaham. Meskipun radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tersebut, tetapi bisa juga melekat pada semua agama. Radikalisme biasanya muncul karena ketidakadilan dan keterancaman yang dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ia akan lahir secara ideologis dengan memupuk kebencian terhadap kelompok yang dianggap oposisi dan menyebabkan ketidakadilan yang mengancam identitasnya. Adapun contoh dari indikator ketiga ini adalah mengkampanyekan moderasi melalui media sosial.

Keempat, indikator moderasi adalah penerimaan terhadap budaya lokal untuk melihat sejauh mana

seseorang mampu menerima praktik agama yang mengakomodasi kearifan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat cenderung mudah dalam menerima budaya lokal terkait dengan cara beragamanya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, ada kelompok yang tidak akomodatif terhadap kearifan lokal karena dianggap sebagai suatu hal yang menciderai kemurnian agama. Misalnya dalam rangka dies natalis UIN Walisongo ke-51, para dosen menulis dalam buku bunga rampai dengan tema moderasi Walisongo. Ada 51 tulisan pendek yang terkumpul dalam buku bunga rampai tersebut. Tujuannya adalah agar ide segar terkait strategi maupun konsepsi dialog Islam dan tradisi mampu disebarluaskan kepada civitas akademika maupun masyarakat secara luas sehingga kesadaran dan penerimaan terhadap kearifan lokal tidak dianggap bertentangan dengan semangat moderasi beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh walisongo dalam mendakwahkan Islam di Indonesia.[]

Daftar Pustaka

Akmaliah, Wahyudi. 2020. "The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10(1):1–24.

Amin, M. A., and M. T. Yani. 2017. "Peran Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Sikap Kemandirian Santri Melalui Kegiatan Wirausaha Di Ponpes Mukmin Mandiri Sidoarjo." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 889–903.

Amini, Seyed Ahmad Hosseini, and Ali Allahbedashti. 2019. "An Examination of Moderateness in the Qur'an Based on Immamiyah Theology." *Islamic Perspective* 22:29–39.

Andrios, Benny. 2021. "UIN Raden Mas Said Surakarta Kini Miliki Taman Moderasi." Retrieved October 18,

2021 (https://kemenag.go.id/read/uin-raden-mas-said-surakarta-kini-miliki-taman-moderasi-rxevy).

Arafah, Sitti. 2020. “Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural).” *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 6(1):58–73.

Arifianto, Alexander R. 2018. “Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?” *Asian Security* 15(3):323–42.

Azhari, Subhi, and Halili. 2020. *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020*. Jakarta.

Aziz, Abdul. 2020. “Akar Moderasi Beragama Di Pesantren (Studi Kasus Di Ma’had Aly Sukorejo Situbondo Dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama).” *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 18(1):142–57.

Aziz, Yugni Maulana. 2021. “Hegemoni Kekuasaan Ustadz Hikmat Arif Terhadap Masyarakat Kampung Dalur Mawar Desa Bojong Pandan Kabupaten Serang: Perspektif Teori Antonio Gramsci.” *Jurnal Silatene (Jurnal Sosial Humaniora)* 1(1):50–70.

Balitbang Kemenag. 2019a. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang Kemenang RI.

Balitbang Kemenag. 2019b. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang Kemenang RI.

Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dakir, Dakir, and Harles Anwar. 2020. "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 3(2):495–517.

Denzin, Norman K., and Yvonna S Lincoln. 2009. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. 2019. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25(2):95–100.

Faisal, Muhammad. 2020. "Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di ERa Digital." *ICRHD: Journal of International Conference on Religion, Humanity and Development* 195–202.

Faruk. 2010. *Pengantar Sosiologi Sastra Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghozali, Mahbub, and Derry Ahmad Rizal. 2021. "TAFSIR KONTEKSTUAL ATAS MODERASI DALAM AL-QUR'AN: SEBUAH KONSEP RELASI KEMANUSIAAN." *Jurnal Studi Agama Dan*

Masyarakat 17(1):31–44.

Hefni, Wildani. 2020. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13(1):1–22.

Hendarto, Heru. 1993. "Mengenai Konsep Hegemoni Gramsci." P. 73 in *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, edited by Tim Redaksi Driyarkaya. Jakarta: Gramedia.

Heryanto, Ariel. 1997. "Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci." *Forum Keadilan* 4(2).

Humas UIN Raden Mas Said. 2018a. "Arti Lambang/Mars Dan Hymne." Retrieved October 19, 2021 (https://iain-surakarta.ac.id/profil-iain/arti-lambang/).

Humas UIN Raden Mas Said. 2018b. "Selayang Pandang." Retrieved October 19, 2021 (https://iain-surakarta.ac.id/profil-iain/selayang-pandang/).

Humas UIN Raden Mas Said. 2021a. "Perkuat Moderasi Beragama Di Kampus, IAIN Surakarta Ikut Andil Dalam Workshop Rumah Moderasi Beragama Se-Indonesia." *5 Mei*. Retrieved October 18, 2021 (https://iain-surakarta.ac.id/perkuat-moderasi-beragama-di-kampus-iain-surakarta-ikut-andil-dalam-workshop-rumah-moderasi-beragama-se-indonesia/).

Humas UIN Raden Mas Said. 2021b. “Respons Isu ‘Radikalisme’ MD Angkat Tema Moderasi Beragama Dalam PKM.” *20 Mei*. Retrieved October 18, 2021 (https://md-iainsurakarta.web.id/2021/03/20/respons-isu-radikalisme-md-angkat-tema-moderasi-beragama-dalam-pkm/).

Humas UIN Walisongo. 2017. “Logo - UIN Walisongo.” Retrieved October 19, 2021 (https://walisongo.ac.id/?page_id=4371).

Humas UIN Walisongo. 2019a. “MENTERI AGAMA RI FACHRUL RAZI RESMIKAN RUMAH MODERASI BERAGAMA DAN LAUNCHING SMART & GREEN CAMPUS UIN WALISONGO SEMARANG – Rumah Moderasi.” *19 Desember*. Retrieved October 19, 2021 (https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=229).

Humas UIN Walisongo. 2019b. “Peresmian Rumah Moderasi Beragama Dan Launching Smart and Green Campus UIN Walisongo Semarang - YouTube.” *19 Desember*. Retrieved October 19, 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=LDJaCrgoLsA).

Humas UIN Walisongo. 2020a. “5.712 Unggahan Video Bertema Moderasi Beragama, UIN Walisongo Kembali Pecahkan Rekor MURI – Rumah Moderasi.” *27 Oktober*. Retrieved October 19, 2021 (https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=236).

Humas UIN Walisongo. 2020b. "Moderasi Beragama Dikembangkan Sesuai Platform Walisongo – Rumah Moderasi." *16 Juli*. Retrieved October 19, 2021 (https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=239).

Humas UIN Walisongo. 2020c. "Profil Rumah Moderasi UIN Walisongo." Retrieved October 18, 2021 (https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?page_id=80).

Humas UIN Walisongo. 2020d. "UIN Walisongo Siapkan Mata Kuliah Islam Dan Moderasi – Rumah Moderasi." *24 Desember 2020*. Retrieved October 19, 2021 (https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=207).

Humas UIN Walisongo. 2021a. "Halaqah Ulama RMB Walisongo – Rumah Moderasi." *16 Agustus*. Retrieved October 19, 2021 (https://rumahmoderasi.walisongo.ac.id/?p=425).

Humas UIN Walisongo. 2021b. "KKN Reguler Dari Rumah 77, Angkat Tema Covid Dan Moderasi Agama - UIN Walisongo." *1 Oktober 2021*. Retrieved October 19, 2021 (https://walisongo.ac.id/?p=1000000008888).

Hutagalung, Daniel. 2004. "Hegemoni, Kekuasaan Dan Ideologi." *Jurnal Diponegoro* 6(12).

Ibrahim, Ibrahim, Zaenuddin Hudi Prasojo, and S. Sulaiman. 2019. "Preventing Radicalism: Islamic Moderation and Revitalization in the Border."

Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 4(1):1–15.

Kemenag. 2019. "UIN Jakarta Beri Penghargaan Lukman Hakim Saifuddin Pencetus Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jumat, 20 Desember 2019 10:45 WIB*. Retrieved April 23, 2021 (https://kemenag.go.id/berita/read/512420/uin-jakarta-beri-penghargaan-lukman-hakim-saifuddin-pencetus-moderasi-beragama-di-indonesia).

Kemenag. 2021. "Menag: Pengarusutamaan Moderasi Beragama Melalui Lembaga Pendidikan Sangat Strategis." *Kamis, 25 Februari 2021 08:01 WIB*. Retrieved April 23, 2021 (https://kemenag.go.id/read/menag-pengarusutamaan-moderasi-beragama-melalui-lembaga-pendidikan-sangat-strategis-4x140).

Khaerulasfar, khaerulasfar. 2020. "Analisis Penafsiran Moderasi Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 5(1):51–79.

Kosasih, Engkos. 2019. "Literasi Media Sosial Dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama." *Jurnal Bimas Islam* 12(2):263–96.

Ma'arif, Syamsul. 2014. "IDEOLOGI PESANTREN SALAF: DERADIKALISASI AGAMA DAN BUDAYA DAMAI." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12(2):198–

209.

Ma’arif, Syamsul, Leonard C. Sebastian, and Sholihan Sholihan. 2020. “A Soft Approach to Counter Radicalism: The Role of Traditional Islamic Education.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28(1):1–28.

Mahrus, Erwin, and Zaenuddin Hudi Prasojo. 2020. “Messages of Religious Moderation Education.” *Madina* 24(1):39–48.

Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar. 2020. “Peran Strategis IAIN Ambon Dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial Dan Moderasi Beragama Di Ambon Maluku.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13(1):103–24.

Meirison, Meirison, Desmadi Saharuddin, Rosdialena Rosdialena, and Muhammad Ridho. 2020. “MODERASI ISLAM DALAM KESETARAAN GENDER (KOMPARASI TERHADAP AGAMA YAHUDI DAN NASRANI).” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 6(1):1–30.

Miftahuddin, Muhammad, Fatikhatul Faizah, and Arif Kurniawan. 2021. “Moderasi Beragama Dalam Situs Tafsiralquran.Id.” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6(2):54–78.

Miles, Matthew B., and Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode*

Baru. Jakarta: UI-press.

Munir, Moh. Badrul, and Herianto. 2020. “Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi Dan Prestasi Akademik.” *Prosiding Nasional: Peluang Dan Tantangan Studi Islam Interdisipliner Dalam Bingkai Moderasi* 3:137–50.

Mustafa, Muhammad Sadli. 2020. “Awa Itaba La Awai Assangoatta: Aplikasi Moderasi Beragama Dalam Bingkai Kearifan Lokal To Wotu.” *Al-Qalam* 26(2):307.

Novia, Washilatun, and Wasehudin Wasehudin. 2020. “Penggunaan Media Sosial Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3(2):99–106.

Nur, Muhammad. 2020. “Kearifan Lokal Sintuwu Maroso Sebagai Simbol Moderasi Beragama.” *PUSAKA: Jurnal Khazanah Keagamaan* 8(2):241–52.

Patria, Nezar, and Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci Negara Dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qolbi, Insan Khoirul. 2019. “LHS Dan Moderasi Beragama.” *Kamis, 5 September 2019 07:50 WIB*. Retrieved April 23, 2021 (https://kemenag.go.id/berita/read/511485/lhs-dan-moderasi-beragama).

Qoyyimah, Azizatul, and Abdul Mu'iz. 2021. "Tipologi Moderasi Keagamaan: Tinjauan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 6(1):22–49.

Ramli, Ramli. 2019. "Moderasi Beragama Bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa Di Kota Makassar." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12(2):135–62.

Redaksi. 2018. "Tentang Kami - Islamsantun.Org." *2018*. Retrieved October 19, 2021 (https://islamsantun.org/tentang-kami/).

Ritchie, Jane, and Lewis Jane. 2003. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London, California: Thousand Oaks, Sage Publications.

Ropi, Ismatu. 2019. "Whiter Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia." *Studia Islamika* 26(3):597–601.

Salamah, Nur, Muhammad Arief Nugroho, and Puspo Nugroho. 2020. "Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan." *Quality* 8(2):269.

Sari, Gusti Rahma, Gery Giovano, and Irfan Fadlurrahman. 2021. "Traces of Religious Moderation in the Tafsir of the Qur'anuladhimi by

Hasan Mustopa." Pp. 359–72 in *Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies*. Bandung: Gunung Djati Conference Series.

Setara, Institute. 2019. *Wacana Dan Gerakan Keagamaan Di Kalangan Mahasiswa: Memetakan Ancaman Atas Negara Pancasila Di Perguruan Tinggi Negeri*.

Simon, Roger. 1999. "Gramsci's Political Thought (Gagasan-Gagasan Politik Gramsci)." 213.

Sirozi, Muhammad, and Yenrizal. 2020. "Preventing Religious Radicalism on College Student in the Islamic State Higher Education (PTKIN) Case Study of Islamic State University (UIN) in Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology* 17(6):7062–84.

Sirry, Mun'im. 2020. "Muslim Student Radicalism and Self-Deradicalization in Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 31(2):241–60.

Sugihartati, Rahma, Bagong Suyanto, and Mun'im Sirry. 2020. "The Shift from Consumers to Prosumers: Susceptibility of Young Adults to Radicalization." *Social Sciences* 9(4):40.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya/ Suhardono*. Jakarta: Gramedia.

Sulhan, Moh., Hasbiyallah Hasbiyallah, and Dadan Nurul Haq. 2018. "Prophetic Bases of Islamic Moderation

of State Islamic Higher Education (PTKIN).” 261(Icie):52–57.

Supriyanto, A. Sunaryo, and M. K. Albar. 2020. “Exploring the Implementation of De-Radicalization Strategy on Religion among the Islamic University Students (A Multisites Study at Islamic Higher Education in Indonesia).” *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7(8):58–68.

Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. 2018. “KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan.” 5572(11):189–210.

Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. 2020. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 5572(11):189–210.

Syifa, M. Mucharom. 2020. “Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan Dalam Mereduksi Radikalisme Agama Di Indonesia (Kajian Epistemologis-Historis).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 2(1):31–41.

Tim Senat. 2019. *Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019-2023*.

Tim Senat. 2020. *Rencana Strategis IAIN Surakarta 2020-2024*.

Ulinnuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah. 2020. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab." *SUHUF* 13(1):55–76.

Wibowo, Ari. 2019. "Kampanye Moderasi Beragama Di Facebook: Bentuk Dan Strategi Pesan." *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5(2):85–103.

Widodo, Edy. 2021. "Dema IAIN Surakarta Gelar Dialog Lintas Agama." *21 April*. Retrieved October 18, 2021 (https://www.timesindonesia.co.id/read/news/342698/dema-iain-surakarta-gelar-dialog-lintas-agama).

Winata, Koko Adya, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih, and Qiqi Yuliati Zaqiah. 2020. "Peran Dosen Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Mendukung Program Moderasi Beragama." *Jurnal Pendidikan* 8(2):98–110.

Yahya, Sudirman. 2020. "The Slogan 'Torang Samua Ciptaan Tuhan' Among The Plural Community In The Context Of Religious Moderation In Manado." *Dialog* 43(1):1–22.

Yusuf, Muhammad, Nahdhiyah Nahdhiyah, and Anwar Sadat. 2021. "Fazlur Rahman's Double Movement and It's Contribution to the Development of Religious Moderation." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4(1):51–71.

Zafi, Ashif Az. 2020. "PENERAPAN NILAI-NILAI MODERASI AL-QUR'AN DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21(1):23–46.

Zamimah, Iffaty. 2018. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Al-Fanar* 1(1):75–90.

Riwayat Penulis

HASYIM MUHAMMAD, lahir di Lamongan Jawa Timur pada 15 Maret 1972. Pendidikan dasar diselesaikan di MI Tahdzibiyah Sidokelar Paciran (1984) dan sekolah menengah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan (1987 & 1990). Menyelesaikan Sarjana (S1) Jurusan Tafsir & Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang (1995), S2 (2000) dan S3 (2012) Studi Islam di Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. Sempat nyantri di beberapa Pondok Pesantren, antara lain PP. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan, PP. Sunan Drajat Paciran, PP. al-Ma'had al-Ulum as-Syar'iyah (MUS) Sarang Rembang dan PP. Salafiyah Syafi'iyah Langitan Widang Tuban. Sejak

tahun 1997 menjadi dosen tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang dan dosen Agama Islam di Fakultas Ekonomi UNTAG Semarang sejak tahun 1998. Pernah menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Keagamaan dan Kemasyarakatan (LPK2) Fakultas Ushuluddin, (2002-2004); Ketua Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Ushuluddin IAIN Walisongo (2006-2010).

Aktif dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan, antara lain sebagai pengasuh Forum Mudzakaroh Semarang (1997 – Sekarang); Pengurus Yayasan al-Muhsinun dan Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf (LEMBKOTA) Semarang, Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PWNU Jawa Tengah (2003 – 2013), Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah (2013-2023).

Menerbitkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku antara lain: *Metodologi Studi Islam* (Penerbit Gunung Jati Semarang, 2000); *Dialog antara Tasawuf dan Psikologi* (Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002); *Kristologi Qur'ani* (Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005); dan *Tafsir Tematik: al-Qur'an dan Masyarakat* (Penerbit Elsaq Yogyakarta, 2007), *Pendekatan Irfani Kontekstual Sebuah Rekonstruksi Metode Tafsir Sufi* (Walisongo Press, 2010), *Kezuhudan Isa al Masih dalam Literatur Sufi* (2014).[]

NAILI NI'MATUL ILLIYYUN, lahir di Kudus 10 Januari 1991. Menempuh pendidikan dasar hingga aliyah di madrasah berbasis NU di kota kelahirannya. Sejak menempuh pendidikan S1 Tafsir Hadits IAIN Walisongo (2012) mulai concern pada kajian relasi lintas iman kemudian melanjutkan jenjang S2 di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (2015). Mengawali karirnya sebagai asisten dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015. Pernah menjadi dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2017) kemudian menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang (2018 – sekarang).

Beberapa penelitian yang dilakukan antara lain: *Inclusive Spirit in the Light of the Qur'an (a Thematic Study of the Qur'anic Verses)* (2012); *Commodification of Religion and Pop Culture on Social Media: Netnographic Studies* (2018); *Pengalaman Sosial Politik Warga Kerohanian Sapta Dharma dalam Perspektif Pluralisme Kewargaan* (2019); *Aisnusantara: Kontribusi Santri Membangun Narasi Damai di Era Digitalisasi Media* (2020); *Dynamics in Attaining Woman Quota of 30%(Study among Political Parties in Central Java Province Indonesia)* (2021); *The Analysis of*

Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective (2021); *Dinamika Kehidupan Ekonomi Petani Garam di Desa Dresi Kulon* (2021).

Aktif di Persaudaraan Lintas Iman (Pelita) yang merupakan jaringan komunitas dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan di kota Semarang. Malkukan pengabdian kepada masyarakat di pondok pesantren Darul Falah Besongo Ngaliyan Semarang dan juga Oemah Santri Ngaliyan Semarang. Beberapa konferensi yang pernah diikuti antara lain *International Conference Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia* (2014); *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) (2017 dan 2019); *Fikrah and Esoteric Annual Conference on Religion and Media* (2018); *International Conference on Democracy and Social Transformation* (ICON-DEMOST) (2021); *International Conference on Ushuluddin and Humanities Studies* (ICON-HUMANS) (2021).[]

Pengarusutamaan Moderasi Beragama di PTKIN

Buku melengkapi studi terdahulu tentang radikalisme di perguruan tinggi dengan mengkaji peran perguruan tinggi dalam menangkal paham radikal melalui penguatan moderasi beragama. Kajian ini tidak sekedar mengidentifikasi gagasan dan implementasi moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, akan tetapi sampai pada basis argumentasi implementasi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi. Lebih lanjut, kajian ini juga akan mengungkap implikasi dari langkah-langkah sistemik yang dilakukan perguruan tinggi dalam pengarusutamaan moderasi beragama.

Rafi Sarana Perkasa
Villa Ngaliyan Permai Blok E.9 Semarang 50185
Telp. +62 24 7611825
E-mail:rsp_rafi@yahoo.com

ISBN: 978-602-7969-79-7